



**REVISI 2024**



# **RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TAHUN 2020 - 2024**

**POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

## KATA PENGANTAR

Sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi yang pertama dan terutama di Kalimantan Barat, Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP) telah berkontribusi positif dalam memajukan pendidikan tinggi vokasi. Unjuk kerja positif ini dipresentasikan dalam bidang riset, pengabdian kepada masyarakat, dan prestasi mahasiswa dalam berbagai bidang, baik bidang akademik maupun non-akademik, serta unjuk kerja lulusan yang bekerja di berbagai bidang sesuai dengan kompetensinya maupun sebagai wirausaha mandiri.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP) bertujuan untuk menjadi panduan dalam pelaksanaan dan pengembangan institusi selama lima tahun ke depan. Dokumen Renstra ini bersifat fleksibel, bukan tetap, sehingga bisa ditinjau dan diperbarui setiap tahun. Selain itu, revisi juga bisa dilakukan seiring dengan perubahan yang terjadi sebagai akibat penerapan Kepmendikbudristek 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi yang menggantikan Kepmendikbudristek 3/M/2021, yang diperkirakan akan mempengaruhi secara substansial pelaksanaan dan pengembangan Polnep.

Renstra ini memuat sasaran strategis beserta indikator-indikator kinerjanya merupakan harapan dan sasaran yang akan dicapai di masa depan, dengan mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal yang dianalisis dengan cermat dan teliti. Sinergitas dari segenap civitas akademika Polnep akan sangat menentukan keberhasilan dari Renstra ini.

Pontianak, Juli 2024  
Direktur Politeknik Negeri Pontianak



H. Widodo PS

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.    KONDISI UMUM .....	1
C.    MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENSTRA.....	9
D.    KONDISI INTERNAL.....	9
E.    POTENSI DAN PERMASALAHAN .....	20
BAB II TUJUAN DAN SASARAN .....	38
A.    VISI.....	38
B.    MISI.....	39
C.    TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN .....	40
D.    SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN .....	41
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, .....	43
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....	43
A.    ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	43
B.    KERANGKA REGULASI .....	48
C.    KERANGKA KELEMBAGAAN .....	49
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	57
A.    TARGET KINERJA.....	57
B.    KERANGKA PENDANAAN.....	66
BAB V PENUTUP .....	68
A.    PEDOMAN PELAKSANAAN.....	68
B.    KAIDAH PELAKSANAAN.....	69
LAMPIRAN .....	71
1.    MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN .....	72
2.    KERANGKA REGULASI .....	79
3.    DEFINISI OPERASIONAL, METODE PERHITUNGAN, SUMBER DATA, DAN PIC/PENGAMPU MENGACU PADA KEPMENDIKBUDRISTEK 210/M/2023 .....	80
4.    ANALISIS SWOT EVALUASI FAKTOR INTERNAL (EFI) .....	90
5.    ANALISIS SWOT EVALUASI FAKTOR EXTERNAL (EFE) .....	93

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	11
Tabel 2. Tenaga Pendidik Berdasarkan Jabatan Fungsional .....	12
Tabel 3. Jumlah Mahasiswa Polnep Tahun 2016-2020 .....	13
Tabel 4. Jumlah Lulusan Tahun 2017-2020.....	13
Tabel 5. Masa Tunggu Lulusan dalam Bulan.....	13
Tabel 6. Perkembangan Alokasi Dana Penelitian Berdasarkan Jenis Penelitian Tahun 2017-2020 .....	15
Tabel 7. Perkembangan Judul Penelitian Berdasarkan Jenis Penelitian Tahun 2017-2020.....	15
Tabel 8. Perkembangan Kegiatan dan Dana Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2017-2021.....	16
Tabel 9. Kinerja Kerjasama Dalam Negeri Pada Tahun 2017 - 2020 .....	17
Tabel 10. Kinerja Kerjasama Luar Negeri Pada Tahun 2017 – 2020 .....	18
Tabel 11. Realisasi Penerimaan dan Belanja Tahun 2017-2021.....	26
Tabel 12. Indikator Kinerja Tujuan yang akan dicapai dalm Renstra Polnep 2020-2024.....	41
Tabel 13. Indikator Kinerja Sasaran pada Renstra Polnep .....	42
Tabel 14. Kerangka Regulasi .....	48
Tabel 15. Proyeksi Kebutuhan ASN sampai Tahun 2024 .....	55
Tabel 16. Indikator Kinerja Utama Polnep Periode 2020 berdasarkan Kepmendikbud No. 754/P/2020 .....	59
Tabel 17. Perubahan Indikator Kinerja Utama Polnep Periode 2021-2022 berdasarkan Kepmendikbud No. 3/M/2021 .....	61
Tabel 18. Perubahan Indikator Kinerja Utama Polnep Periode 2023-2024 berdasarkan Kepmendikbudristek No. 210/M/2023 .....	64
Tabel 19. Pagu Pendanaan Per Sasaran Kinerja Tahun 2020-2023 .....	67
Tabel 20. Realisasi Tahun 2020-2023.....	67
Tabel 21. Proyeksi Anggaran Tahun 2024.....	67
Tabel 22. Matriks Kinerja dan Pendanaan – Kepmendikbud No. 754/P/2020 .....	74

Tabel 23. Matriks Kinerja dan Pendanaan – Kepmendikbud No. 3/M/2021 .....	76
Tabel 24. Matriks Kinerja dan Pendanaan – Kepmendikbud No. 210/M/2023 .....	78
Tabel 25. Kerangka Regulasi .....	79

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Organisasi Tata Kerja Politeknik Negeri Pontianak.....	11
Gambar 2. Posisi POLNEP pada Kuadran I Matrix Grand Strategy .....	32
Gambar 3. Strategi SWOT .....	36
Gambar 4. Struktur Organisasi Tata Kerja Politeknik Negeri Pontianak ....	49
Gambar 5. Tabel Sinkronisasi Target Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Sesuai Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 .....	66
Gambar 6. Analisis SWOT Evaluasi Faktor Internal (EFI) .....	92
Gambar 7. Analisis Swot Evaluasi Faktor External (EFE) .....	95

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. KONDISI UMUM**

#### **1. Sejarah Singkat Politeknik Negeri Pontianak**

Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP) berdiri berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 80/01KTI/KEP/1985, berada pada lahan 6,3 Hektar, di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Secara administratif, awalnya berada dalam lingkup Universitas Tanjungpura, sehingga beratribut nama, "Politeknik Universitas Tanjungpura" (Politeknik Untan) yang menyelenggarakan program pendidikan **Diploma Dua (D2)** untuk Jurusan/Program Studi: Teknik Sipil; Teknik Mesin; dan Teknik Elektro.

Pada Tahun 1994, Politeknik Untan membuka Jurusan Tata Niaga jenjang **Diploma Tiga (D3)** dengan 2 (dua) Program Studi (Prodi), (1) Akuntansi, dan (2) Administrasi Niaga. Tahun 1997 kedua program studi tersebut dikembangkan menjadi (1) Jurusan Administrasi Bisnis, sampai saat ini telah memiliki Prodi Administrasi Bisnis, Jenjang D3, Prodi Administrasi Negara, Jenjang **Diploma Empat (D4/Sarjana Terapan, S.Tr.)**, dan Administrasi Bisnis Otomotif, Jenjang D4 (S.Tr.). (2) Jurusan Akuntansi, sampai saat ini telah memiliki Prodi Akuntansi, Jenjang D3, dan Prodi Akuntansi Sektor Publik, Jenjang D4 (S.Tr.).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, tanggal **28 April 1997 Nomor: 079/O/1997**, Status kelembagaan Politeknik Untan diotonomikan menjadi **Politeknik Negeri Pontianak (Polnep)**. Tanggal **28 April** inilah yang dijadikan sebagai hari **Dies Natalis Polnep** sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Polnep, Nomor 1787/PL.16/KL/2016.

Selaras dengan kondisi lingkungan strategis, tahun 1999 Polnep membuka Jurusan Teknologi Pertanian (TP), dengan Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (TPHP) jenjang Diploma III.



Kemudian pada tahun 2002 dibuka Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan (IKP) dengan Program Studi Budidaya Perikanan (BDP), Jenjang Diploma III. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, No. 126/O/2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Polnep, di tahun 2003 bertambah 2 (dua) Program Studi yaitu Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan (TPI) jenjang D3 dan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (TPHP) jenjang D3. Kedua prodi tersebut bergabung di Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan (IKP). Kemudian tahun 2007 bertambah satu Program Studi Teknik Elektronika (TELK), jenjang D3 pada Jurusan Teknik Elektro, dan tahun 2009 dibuka Program Studi Teknik Informatika (TIF), jenjang D3 pada Jurusan Teknik Elektro.

Pada tahun 2008 Polnep, menambah prodi untuk jenjang Sarjana Terapan, S.Tr. (D4), yaitu: Prodi Teknik Perencanaan Perumahan dan Permukiman (TP3) pada Jurusan Teknik Sipil; Administrasi Negara (AN) pada Jurusan Administrasi Bisnis, dan Akuntansi Sektor Publik (ASP), pada Jurusan Akuntansi. Pada tahun 2010 dibuka Program Studi Operator dan Peralatan Alat Berat, jenjang **Diploma Satu (D1)** pada Jurusan Teknik Mesin. Tahun 2014 dibuka Program Studi Teknik Mesin Konversi Energi, jenjang Sarjana Terapan, S.Tr. (D4) pada Jurusan Teknik Mesin; Prodi Budidaya Tanaman Perkebunan, jenjang Sarjana Terapan, S.Tr. (D4), dan Manajemen Perkebunan (MJP), jenjang Sarjana Terapan, S.Tr. (D4) pada Jurusan Teknologi Pertanian. Dan pada tahun 2016, dibuka Prodi Desain Kawasan Binaan (DKB), jenjang Sarjana Terapan, S.Tr. (D4) dan Arsitektur Bangunan Gedung (ABG), jenjang Sarjana Terapan, S.Tr. (D4) pada Jurusan Teknik Arsitektur.

Bersinergis dengan pemerintah kabupaten dan kota dengan sasaran meningkatkan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APKPT) penduduk Kalimantan Barat, untuk pertama kalinya Polnep mendapatkan kepercayaan menyelenggarakan program studi di luar domisili (PDD) rintisan Akademi Komunitas (AK), jenjang D2 di **Kota Singkawang**. Kepercayaan ini didasarkan pada Surat Keputusan



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, No. 210/P/2012, tanggal 12 Oktober 2012, tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi Di Luar Domisili. Program Studi yang diselenggarakan adalah (1) Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan, dan (2) Program Studi Teknik Informatika. Namun demikian, sejak Tahun Akademik 2018/2019 kedua prodi ini tidak lagi menerima mahasiswa baru, sehingga pada Semester Genap, Tahun Akademik 2019/2020 hanya tersisa satu angkatan yang diwisuda pada bulan Nopember 2020.

Seiring diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, No. 179/P/2013, tanggal 26 September 2013, tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi Di Luar Domisili, Polnep mendapatkan penugasan menyelenggarakan Program Studi Di Luar Domisili (PDD) rintisan Akademi Komunitas (AK), jenjang D2 di **Kabupaten Polewali Mandar**, Sulawesi Barat. Program studi yang diselenggarakan adalah (1) Teknik Pengolahan Hasil Perkebunan, dan (2) Program Studi Teknik Mesin. Penyelenggaraan PDD rintisan Akademik Komunitas (AKN) di Kabupaten Polewali Mandar berakhir sampai tahun 2015 berdasarkan surat Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti, No. 1040/C.C4/KL/2016, tanggal 26 Mei 2016.

Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah **Kabupaten Kapuas Hulu**, Polnep Berdasarkan Surat Keputusan Kemenristekdikti, Nomor 451/M/Kp/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, menyelenggaraan **Program Studi di luar Domisili (PDD)** jenjang D3 untuk program studi: (1) Teknik Sipil, (2) Teknologi Budidaya Perikanan, dan (3) Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan, yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu di **Putussibau**. Pada tahun 2018, Polnep bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau berdasarkan Surat Keputusan Kemenristekdikti, Nomor 765/KPT/I/2018, tanggal 12 September 2018, menyelenggarakan **Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU)** jenjang D3 untuk program studi: (1) Akuntansi; (2) Teknologi Mesin; dan (3) Pengelolaan Hasil Perkebunan, yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Sanggau,

yaitu di Sanggau. Sampai dengan akhir Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, Polnep yang berakreditasi Institusi “B”, sesuai dengan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, No. 3112/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016, mengelola 8 (delapan) Jurusan dengan 30 (tiga puluh) program studi. Kampus Utama dengan 22 (duapuluh dua) program studi telah terakreditasi 95,5%, hanya 1 (satu) prodi on going process. Kemudian 3 (tiga) Program Studi di Kampus PDD Kapuas Hulu 100% telah terakreditasi, sedangkan Kampus PSDKU Sanggau masih pada posisi memenuhi pesyaratan minimum akreditasi, sebagaimana dinyatakan pada izin pembukaan program studinya. Izin operasional dan status akreditasi masing-masing program studi sebagaimana ditunjukkan dalam Lampiran.

## 2. Penjelasan Latar Belakang Penyusunan Renstra 2020 – 2024

Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Pontianak (Polnep) tahun 2020-2024 pada intinya merupakan penjabaran Visi, Misi dan Tujuan Polnep, yang secara substansial mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan merupakan kelanjutan dari Renstra Polnep tahun 2016–2019 yang berisi program-program strategis untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang Politeknik Negeri Pontianak guna mewujudkan visi dan misi Polnep. Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan dan pengembangan Polnep lima tahun ke depan.

Memperhatikan kontemplasi berbagai sumber perundangan di atas, maka disusun Rencana Strategis Politeknik Negeri Pontianak (Renstra Polnep) Tahun 2020 – 2024. Renstra Polnep Tahun 2020 – 2024 ini, merupakan pedoman bagi seluruh unsur manajemen dan karyawan Polnep dalam mengimplementasikan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Vokasi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. Spirit utamanya adalah

meningkatkan ketersediaan dan pelayanan pendidikan tinggi vokasi yang bermutu, relevan dengan industri, dunia usaha dan dunia kerja (IDUKA), memperluas keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan akses anak bangsa untuk memperoleh layanan pendidikan tinggi vokasi. Keseluruhan program prioritas kelembagaan tersebut, dikemas dalam instrumen pembelajaran yang berorientasi pada “**Merdeka Belajar Kampus Merdeka**” (MBKM) di era industri 4.0. Implementasi secara komprehensif program prioritas tersebut, diharapkan dapat mendorong Polnep memiliki daya saing, sebagai **Pusat Unggulan**, **Pusat Standar**, dan **Pusat Inovasi** dan **Kreativitas**, dalam mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan memegang teguh Motto Polnep “**Tepat Waktu, Tepat Ukuran** dan **Tepat Aturan**”.

Renstra ini merupakan pedoman yang up to date, sehingga dapat ditinjau ulang secara periodik, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan terkini. Disusun berdasarkan kondisi saat ini, harapan dan sasaran yang akan dicapai di masa depan dengan mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal yang dianalisis dengan cermat dan teliti dalam menentukan dan menetapkan sasaran strategis beserta indikator-indikator kinerjanya.

3. Penjelasan latar belakang revisi renstra kedua (terbitnya Kepmendikbudristek 210/M/2023)

Perguruan tinggi, sebagai lembaga yang mengelola ilmu pengetahuan, penelitian, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat, dituntut untuk lebih terfokus dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022.

Ada tiga tujuan utama dalam pengembangan pendidikan tinggi, yaitu:

1. Menciptakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan sesuai dengan standar industri;
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di pendidikan tinggi vokasi sehingga dapat dimanfaatkan di dunia kerja;
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan perguruan tinggi vokasi. Perguruan tinggi diharapkan dapat mencapai ketiga tujuan ini melalui peningkatan kapasitas dan kualitas proses serta pengelolaan pendidikan yang bertanggung jawab.

Salah satu cara utama untuk mengukur kinerja perguruan tinggi adalah melalui Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi (IKU) yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023. IKU yang ditetapkan harus mampu berfokus pada ketiga tujuan pengembangan tersebut dan memastikan kualitas.

Sehingga didasarkan pada mandat pengembangan pendidikan tinggi, Indikator Kinerja Utama (IKU) harus mampu berfungsi sebagai alat ukur dan pendorong untuk pengembangan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri. Melalui kebijakan ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berusaha memastikan bahwa lembaga pendidikan tinggi dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, dan mencapai standar internasional. Dosen, sebagai sumber daya utama, akan lebih mudah mencapai target yang ditetapkan dan didorong untuk menerapkan metode pembelajaran yang lebih inovatif, seperti pembelajaran berbasis masalah dan kolaboratif. Dengan demikian, MBKM diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi dunia kerja.

Ketika mahasiswa lulus, mereka diharapkan menjadi lulusan yang siap belajar sepanjang hayat, mampu menyesuaikan diri dengan

perubahan (adaptif), dan memiliki kemampuan bersaing yang tinggi di dunia kerja.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penilaian kinerja perguruan tinggi negeri (PTN) akan diubah. Penilaian akan berfokus pada Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU ini seperti perjanjian antara PTN dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. IKU terbaru yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Nomor 210/M/2023 memiliki tiga indikator utama:

1. Kualitas Lulusan: Diukur dari seberapa banyak lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak dan terlibat dalam kegiatan di luar kampus (misalnya, penelitian, organisasi).
2. Kualitas Dosen: Diukur dari seberapa aktif dosen terlibat dalam kegiatan di luar kampus (misalnya, penelitian, publikasi), kualifikasi akademik dosen, seberapa banyak praktisi industri yang mengajar di kampus, dan sejauh mana hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau diakui secara internasional.
3. Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran: Diukur dari seberapa banyak program studi yang bekerja sama dengan mitra industri, seberapa kolaboratif dan partisipatif suasana kelas, serta apakah ada program studi yang diakui secara internasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu penyesuaian dalam bentuk Revisi Renstra Politeknik Negeri Pontianak. Agar lebih sesuai dengan amanat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

## **B. LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Pontianak;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024; dan
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, khususnya pada upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mendorong Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk meningkatkan APK Perguruan Tinggi, di tahun 2023 di target 21,75%.
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62/D/M/2023 tentang Pedoman Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Vokasi.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENSTRA**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Pontianak (Polnep) memiliki beberapa maksud dan tujuan utama:

1. Memberikan Arah yang Jelas: Renstra ini disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Polnep. Ini mencakup perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek untuk pelaksanaan kegiatan dan anggaran di lingkungan Polnep<sup>1</sup>.
2. Pedoman Pelaksanaan: Renstra ini berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggaraan dan pengembangan Polnep. Ini mencakup rumusan visi, misi, tujuan, program, dan pedoman kerja untuk periode tertentu<sup>2</sup>.
3. Pencapaian Visi dan Misi: Tujuan utama dari penyusunan Renstra adalah untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang Polnep guna mewujudkan visi dan misi institusi<sup>1</sup>.
4. Efisiensi dan Efektivitas: Renstra ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program serta kegiatan dilakukan secara efisien, efektif, terintegrasi, sinergis, dan berkesinambungan.

### **D. KONDISI INTERNAL**

1. Organisasi dan Tata Kerja

Sehubungan dengan perkembangan pengelolaan pendidikan tinggi di bidang Tata Kelola sangat berkembang seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Polnep telah melakukan perubahan organisasi dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Pontianak tertanggal 04 April 2023 yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/O/2002 tentang Organisasi dan Tata

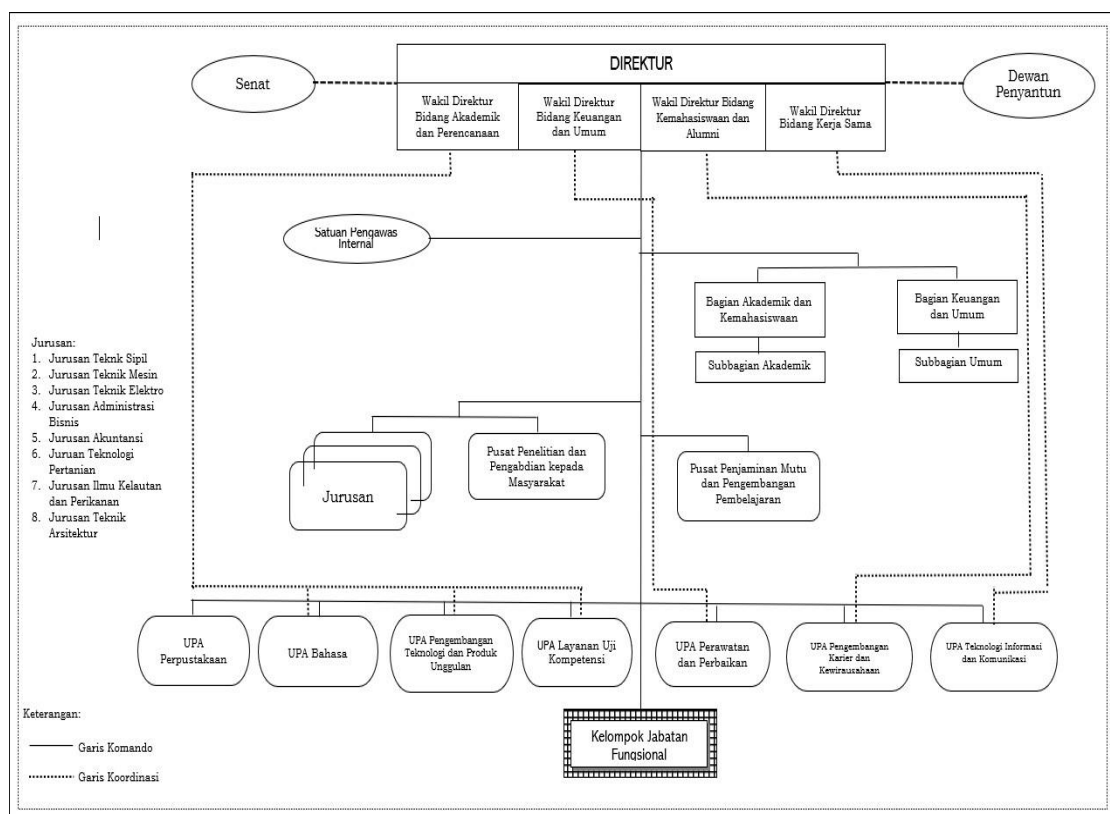


Kerja Politeknik Negeri Pontianak tertanggal 31 Juli 2002, yang sudah digunakan selama 17 tahun.

Politeknik Negeri Pontianak mempunyai Susunan Organisasi sesuai dengan BAB III pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Pontianak yaitu:

1. Direktur dan Wakil Direktur;
2. Senat;
3. Satuan Pengawas Internal;
4. Dewan Penyantun;
5. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
6. Bagian Administrasi Keuangan dan Umum;
7. Jurusan;
8. Laboratorium/ Studio;
9. Kelompok Dosen;
10. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
11. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran;
12. Unit Penunjang Akademik meliputi:
  - 1) Perpustakaan;
  - 2) Bahasa;
  - 3) Pengembangan Teknologi dan Produk Unggulan;
  - 4) Layanan Uji Kompetensi;
  - 5) Perawatan dan Perbaikan;
  - 6) Pengembangan Karier dan Kewirausahaan;
  - 7) Teknologi Informasi dan Komunikasi.
13. Unit Pendukung lainnya

Berikut Organisasi dan Tata Kelola Politeknik Negeri Pontianak yang telah terbit berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Pontianak tertanggal 04 April 2023



Gambar 1. Organisasi Tata Kerja Politeknik Negeri Pontianak

## 2. Sumber Daya Manusia

### a. Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

NO.	URAIAN	PENDIDIKAN						
		SLTA	SLTA	D2/D3	S1/D4	S2	S3	JUMLAH
1.	Tenaga Pendidik	-	-	-	-	272	23	295
2.	Dosen dengan Perjanjian Kerja (DPK)	-	-	-	-	11	-	11
3.	Tenaga Kependidikan	1	31	11	56	13	-	112
4.	Tenaga Kependidikan PLP	-	10	14	19	5	-	48
5.	Tenaga Kependidikan Honorer/PPNPN	1	28	37	20	2	-	88
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>69</b>	<b>62</b>	<b>95</b>	<b>303</b>	<b>23</b>	<b>554</b>

Tabel 1. Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

### b. Jumlah Tenaga Pendidik berdasarkan Jabatan Fungsional

Berdasarkan jabatan fungsional, kondisi dosen Polnep saat ini sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

NO.	URAIAN	JABATAN FUNGSIONAL					
		BELUM FUNGSIONAL	ASISTEN AHLI	LEKTOR	LEKTOR KEPALA	GURU BESAR	JUMLAH
1.	Tenaga Pendidik	61	30	109	104	2	306
	<b>TOTAL</b>	<b>61</b>	<b>30</b>	<b>109</b>	<b>104</b>	<b>2</b>	<b>306</b>

Tabel 2. Tenaga Pendidik Berdasarkan Jabatan Fungsional

### 3. Mahasiswa dan Lulusan

Perkembangan jumlah mahasiswa dalam lima tahun terakhir (2016 – 2020) sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

NO.	PROGRAM STUDI		JUMLAH MAHASISWA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	D-I	Operator dan Peralatan Alat Berat	15	21	18	16	31
2.	D-III	Teknik Sipil	190	222	226	248	257
3.	D-III	Teknik Mesin	315	222	195	158	166
4.	D-III	Teknik Listrik	133	152	176	212	224
5.	D-III	Administrasi Bisnis	343	346	348	359	387
6.	D-III	Akuntansi	346	326	443	554	707
7.	D-III	Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan	287	281	273	282	291
8.	D-III	Arsitektur	221	201	223	203	262
9.	D-III	Budidaya Perikanan	192	207	224	249	241
10.	D-III	Teknologi Penangkapan Ikan	116	97	68	67	98
11.	D-III	Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	159	163	133	143	161
12.	D-III	Teknik Elektronika	117	127	157	181	195
13.	D-III	Teknik Informatika	242	259	304	345	355
14.	D-IV	Perencanaan Perumahan & Pemukiman	258	265	328	308	335
15.	D-IV	Administrasi Negara	314	370	392	441	506
16.	D-IV	Akuntansi	259	291	403	582	808
17.	D-IV	Teknik Mesin	51	95	139	171	201
18.	D-IV	Budidaya Tanaman Perkebunan	51	94	154	177	204
19.	D-IV	Manajemen Perkebunan	116	159	204	215	215
20.	D-IV	Desain Kawasan Binaan		30	52	76	132

21.	D-IV	Arsitektur Bangunan Gedung		30	52	67	151
22.	D-IV	Administrasi Bisnis Otomotif				24	70
23.	D-II	Teknik Informatika (PDD-AK Singkawang)	78	86	99	103	46
24.	D-II	Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (PDD-AK Singkawang)	44	29	29	26	13
25.	D-III	Teknik Sipil (PDD Kapuas Hulu)	90	168	259	294	253
26.	D-III	Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (PDD Kapuas Hulu)	90	172	222	218	193
27.	D-III	Budidaya Perikanan (PDD Kapuas Hulu)	92	164	232	195	141
28.	D-III	Teknik Mesin (PSDKU Sanggau)				17	24
29.	D-III	Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (PSDKU Sanggau)				14	57
30.	D-III	Akuntansi (PSDKU Sanggau)				5	97
<b>TOTAL</b>			<b>4119</b>	<b>4577</b>	<b>5353</b>	<b>5950</b>	<b>6821</b>

Tabel 3. Jumlah Mahasiswa Polnep Tahun 2016-2020

NO.	KETERANGAN	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Lulusan Tahun 2017-2020	1.016	1.122	1.290	1.414

Tabel 4. Jumlah Lulusan Tahun 2017-2020

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan jumlah lulusan pada tahun 2017 - 2020. Jumlah lulusan setiap tahun menunjukkan kenaikan, rata-rata kenaikan jumlah lulusan periode 2017-2020 (year to year) sebesar 10%. Secara akumulasi kenaikan jumlah kelulusan dengan tahun 2017 sebagai baseline dengan jumlah lulusan sebesar 1.016 telah mencapai 43% pada tahun 2020 yang mencatatkan jumlah lulusan sebesar 1414 Mahasiswa.

NO.	KETERANGAN	2017	2018	2019	2020
1.	Masa Tunggu Lulusan dalam Bulan	4,32	3,94	3,84	3,44

Tabel 5. Masa Tunggu Lulusan dalam Bulan

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan dari tahun 2017-2020 semakin singkat. Pada tahun 2017 masa tunggu mendapatkan pekerjaan 4,32 bulan dan

pada tahun 2020 masa tungguanya menjadi 3,44 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa lulusan Polnep semakin diminati oleh mitra DUDIKA sehingga mereka dapat diserap dengan cepat oleh dunia kerja. Strategi yang telah dilakukan Polnep dalam upaya untuk mempersingkat masa tunggu lulusan antara lain melakukan kerjasama dengan industri dalam program magang mahasiswa bersertifikat, perekrutan lulusan, dan memberikan pelatihan dan sertifikasi kompetensi pendamping ijazah bagi mahasiswa.

#### 4. Kurikulum

Politeknik Negeri Pontianak (Polnep) menawarkan berbagai program studi dengan kurikulum yang dirancang untuk memberikan pendidikan vokasional dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri.

##### a. Struktur Kurikulum

Kurikulum di Polnep biasanya mencakup:

1. Mata Kuliah Umum: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan dan Agama.
2. Mata Kuliah Keahlian: Sesuai dengan program studi, mencakup teori dan praktik di bidang terkait.
3. Praktik Kerja Lapangan (PKL): Magang atau kerja praktik di industri untuk memberikan pengalaman langsung di lapangan.
4. Tugas Akhir/Proyek Akhir: Penelitian atau proyek yang harus diselesaikan sebagai syarat kelulusan.

##### b. Metode Pembelajaran

1. Kuliah Tatap Muka: Dosen memberikan materi secara langsung di kelas.
2. Praktikum: Mahasiswa melakukan praktik di laboratorium atau workshop.
3. Studi Kasus dan Proyek: Mengembangkan kemampuan analisis dan problem solving melalui kasus nyata.

5. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

1. Penelitian

JENIS PENELITIAN	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Mandiri	-	-	-	-
Desentralisasi	1.548.943.000	1.627.300.000	1.677.662.000	1.028.338.000
Sentralisasi	1.008.495.000	922.582.950	1.245.926.500	1.607.975.000
Lain-lain	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2.557.438.000</b>	<b>2.549.882.950</b>	<b>2.923.588.500</b>	<b>2.636.313.000</b>

Tabel 6. Perkembangan Alokasi Dana Penelitian Berdasarkan Jenis Penelitian Tahun 2017-2020

JENIS PENELITIAN	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Mandiri	-	-	-	-
Desentralisasi	63	62	72	96
Sentralisasi	23	25	10	5
Lain-lain	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>86</b>	<b>87</b>	<b>82</b>	<b>101</b>

Tabel 7. Perkembangan Judul Penelitian Berdasarkan Jenis Penelitian Tahun 2017-2020

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa secara total alokasi dana penelitian sampai tahun 2020 mengalami peningkatan, laju peningkatan pendanaan dari tahun 2017 sampai tahun 2020 adalah sebesar 5%, pada tahun 2017 jumlah pendanaan sebesar 2.557.438.000 dan pada tahun 2020 menjadi 2.636.313.000. Pada tahun 2020 terjadi penurunan judul penelitian dikarenakan jumlah

yang lolos lebih sedikit dari tahun sebelumnya, namun pagu anggaran setiap judul penelitian meningkat.

## 2. Pengabdian kepada Masyarakat

URAIAN	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	30	23	26	48
Dana Pengabdian Kepada Masyarakat	592.594.500	480.188.400	637.465.625	837.000.000

Tabel 8. Perkembangan Kegiatan dan Dana Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2017-2021

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa pendanaan kegiatan pengabdian berfluktuasi sejak tahun 2017-2021. Hal tersebut berpengaruh kepada jumlah kegiatan pengabdian yang juga mengalami fluktuasi. Skema-skema yang tersedia untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat memang tidak sebanyak skema penelitian. Hal ini berpengaruh terhadap kinerja pengabdian kepada masyarakat. Akan tetapi, saat ini, salah satu indikator kinerja utama adalah adanya hasil penelitian atau kegiatan dosen yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, Polnep terus mendorong agar kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen menghasilkan output yang dapat bermanfaat bagi masyarakat antara lain pembinaan UMKM dan Bumdes dalam rangka peningkatan ekonomi kerakyatan contohnya pendampingan pengolahan komunitas lokal.

Terjadinya fluktuasi anggaran PPM dikarenakan dana PPM sebagian besar berasal dari PNBK yang juga mengalami fluktuasi baik penerimaan maupun alokasi penggunaannya.

## 6. Sarana Prasarana dan Sistem Informasi

Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja aspek sarana dan prasarana menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2017 untuk aset berupa Tanah dengan sertifikat hak milik



Polnep adalah seluas 312.848,00 M<sup>2</sup>, Peralatan Dan Mesin sebanyak 37.310 Unit dimana peralatan dan mesin secara kuantitas jumlahnya bertambah dari tahun 2017 sd 2021, Gedung dan Bangunan 76 unit (Gedung pendidikan 7 unit, GedungLaboratorium 31 unit, Gedung Layanan dan Kantor 38 unit), Jalan dan Jembatan sepanjang 10.996 M<sup>2</sup>, Irigasi sebanyak 6 Unit, Jaringan sebanyak 11 Unit, Aset Tetap Lainnya sebanyak 13.351 buah, Aset Tetap Yang Tidak Digunakan sebanyak 1 Unit. Kelayakan aset yang dimiliki Politeknik Negeri Pontianak masih dapat dipergunakan secara optimal baik untuk proses pembelajaran maupun pelayanan publik

## 7. Kerjasama

No	Katagori Mitra Kerja Sama	2017	2018	2019	2020
1	Instansi Pemerintah	10	19	28	27
2	BUMN	4	1	8	9
3	Perguruan Tinggi	6	4	6	25
4	Industri dan Masyarakat	8	15	16	30
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>39</b>	<b>58</b>	<b>91</b>

Tabel 9. Kinerja Kerjasama Dalam Negeri Pada Tahun 2017 - 2020

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa kinerja kerjasama dalam negeri pada tahun 2017-2020 berjalan dengan baik dimana terjadi peningkatan setiap tahunnya. Adapun kerjasama yang dilakukan dengan berbagai mitra yaitu:

- a. Instansi pemerintah antara lain Kementerian Komunikasi dan Informasi RI untuk kegiatan Digital Talent Scholarship (DTS), beberapa Pemerintah Kabupaten baik itu dalam hal pendirian PDD dan PSDKU di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah maupun pembuatan kajian untuk pengembangan daerah dan sumber daya manusia dengan Pemerintah Daerah dan kerjasama lainnya.
- b. BUMN/BUMD antara lain Perum Bulog, Bank-Bank BUMN dalam hal magang bersertifikat mahasiswa, perekrutan alumni oleh PT

Borneo Alumina Indonesia, maupun sewa barang milik negara oleh Bank BRI, dan kerjasama lainnya.

- c. Industri swasta dan masyarakat antara lain kerjasama pembukaan dual fast track dengan Astra, Toyota, Nissan, Suzuki, kerjasama pemanfaatan bersama sapras dan jasa layanan budidaya perikanan dengan PT Universal Agri Bisnisindo, sewa akses jalan dan lahan parkir dengan Hotel Mercure maupun kerjasama magang mahasiswa dan kerjasama lainnya.

No	Kategori Mitra Kerja Sama	2017	2018	2019	2020
1	Perguruan Tinggi	12	9	20	3
2	Industri	-	-	-	-
3	Lainnya	-	-	-	-
Jumlah		12	9	20	3

Tabel 10. Kinerja Kerjasama Luar Negeri Pada Tahun 2017 – 2020

Capaian kinerja kerjasama khususnya dari luar negeri di tahun 2017-2020 memberikan peningkatan yang cukup signifikan dari kondisi awal sebanyak 12 MOU (2017) menjadi 41 MOU (2020). Kerjasama luar negeri yang berjalan efektif adalah Kerjasama pada instansi Perguruan tinggi, adapun mitra kerja sama dari luar negeri yang aktif sampai sekarang adalah Universite De Cergy Pontoise, University Of Artois, Guiyang Vocational And Technical College, P.R. China Guizhou Jiao Tong College, P.R. China, Guizhou Institute Of Technology, P.R. China Tongren Polytechnic College, P.R. China, Guizhou Polytechnic Of Constuction, P.R. China, Universite Littoral Cote D'opale (Ulco), Universite De Lorraine, Universite De Lille, Universite De Cergy Pontoise, Universite De Lorraine, Management And Science University, Malaysia Politeknik Mukah Sarawak, Stuts, Taiwan Kolej Vokasional Matang, Kementerian Pendidikan Malaysia, Management & Science University, Among Colleges, Polytechnics, Universities Of Indonesia-Philippines-Thailand Vietnam, South Metropolitan Tafe, Chung Cheong University. Mengacu data di atas menunjukkan bahwa Politeknik Negeri Pontianak mendapatkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari

berbagai pihak baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, oleh karena itu ini merupakan kekuatan dan peluang untuk menjadi politeknik yang unggul.

Analisis internal kelembagaan Politeknik Negeri Pontianak dikembangkan dari kinerja dan ketercapaian program strategis Renstra Politeknik Negeri Pontianak 2016-2019 yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Peningkatan Relevansi, Kualitas, dan Kapasitas Pembelajaran

Program strategis ini realisasi ketercapaiannya fluktuatif, namun ada yang realisasinya melampaui target, antara lain jumlah prodi berakreditasi B, sedangkan jumlah lulusan yang bersertifikat kompetensi masih belum tercapai

2. Peningkatan Relevansi, Produktivitas Riset, dan Pengembangan

Pencapaiannya program ini rerata realisasinya 80% yang terdiri dari 4 indikator: yaitu Jumlah Publikasi Internasional, Jumlah HKI yang didaftarkan, Jumlah Publikasi Nasional, dan Kinerja Penelitian.

3. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan

4. Rerata realisasi ketercapaian program ini 85%, bahkan terdapat beberapa target yang melampaui target yang ditetapkan seperti Posisi Polnep dalam ranking Perguruan Tinggi Dunia versi WEBBOMETRIC dan jumlah PT baru yang dibina dan dikembangkan.

5. Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja

Pencapaian dari 4 (empat) target, terealisasi 3 (tiga) target. Terdapat 2 (dua) realisasi yang melampaui target, yaitu efisiensi perencanaan penganggaran, dan indeks kepuasan pelayanan. Target yang realisasinya belum tercapai sesuai target adalah Nilai Laporan Kinerja (yang ditargetkan A, realisasinya BB).

6. Peningkatan Relevansi, Kualitas, dan Kuantitas Sumber Daya Pendidikan

Realisasi pencapaian program strategis yang terdiri atas 5 (lima) indikator ini, menunjukkan realisasi tren fluktuatif. Terdapat 2

(dua) target yang realisasinya melampaui, yaitu Jumlah Dosen Berkualifikasi Pendidikan S2 dan Jumlah Dosen Berkualifikasi Pendidikan S3, sedangkan 3 target belum mencapai, yaitu Jumlah Dosen Bersertifikat Profesi, Jumlah tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1, dan Jumlah tenaga kependidikan bersertifikat fungsional.

## **E. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

### **1. Evaluasi Kinerja Polnep Tahun 2017 – 2021**

Analisis dan evaluasi kinerja utama Politeknik Negeri Pontianak pada 5 tahun terbaru yaitu periode 2017 – 2021 ditinjau berdasarkan 4 (empat) aspek, yaitu: 1) Kinerja Pelayanan, 2) Kinerja Keuangan, 3) Kinerja Sumber Daya Manusia dan, 4) Fasilitas dan kinerja Infrastruktur. Mengacu pada capaian kinerja yang telah tertuang di dalam Renstra Polnep Tahun 2020-2024 maka untuk evaluasi kinerja Polnep 2017 - 2019 diukur berdasarkan 5 sasaran strategis yang terdiri dari meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan, meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan, meningkatnya relevansi, kualitas dan kuantitas sumberdaya; meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan, dan menguatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja Polnep tahun 2020 – 2021 diukur berdasarkan 4 (empat) sasaran kegiatan yaitu Meningkatkan Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi, Meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi, Meningkatkan kualitas dosen perguruan tinggi, dan Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran. Sasaran kegiatan tersebut diukur dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan. Secara ringkas hasil analisis ketercapaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis disajikan sebagai berikut:

#### **a. Evaluasi Kinerja Layanan Pendidikan**

Evaluasi kinerja layanan pendidikan dapat dilihat melalui Laporan Kinerja Polnep yang memuat tentang Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana IKU pada tahun 2017-2019 memiliki perbedaan dengan tahun 2020-2021. Adapun pada tahun 2017-

2019 peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan mengalami fluktuasi. Kualitas kapasitas kelembagaan yang meliputi ranking perguruan tinggi, akreditasi institusi dan jumlah kerjasama industri cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Begitu pula dengan relevansi kualitas dan kuantitas sumber daya serta Relevansi produktifitas riset dan pengembangan cenderung mengalami peningkatan.

Capaian kinerja pada tahun 2020-2021 untuk Kualitas lulusan pendidikan tinggi dan kualitas dosen perguruan tinggi cenderung mengalami peningkatan. Kualitas kurikulum dan pembelajaran, serta tata kelola satker dilingkungan ditjen pendidikan vokasi secara keseluruhan rata-rata mengalami peningkatan.

Tingkat keketatan penerimaan mahasiswa baru (jumlah mahasiswa lulus seleksi dibanding jumlah pendaftar) menunjukkan pergerakan yang fluktuatif dari tahun 2017-2019 dengan tingkat rasio 1:3,30 pada tahun 2017 s.d 2019, 1:3,17 pada tahun 2020 dan 1:3,14 pada tahun 2021. Pada tahun 2021, jumlah mahasiswa yang diterima menurun dikarenakan pendaftar terbanyak dari prodi unggulan yaitu akuntansi dan administrasi bisnis sehingga melebihi daya tampung pada prodi tersebut.

Jumlah mahasiswa aktif (student body) di Polnep menunjukkan pola peningkatan dari tahun 2017 sampai 2021 jumlah mahasiswa aktif rata – rata mengalami peningkatan 10,64 % pertahun. Untuk Perbandingan jumlah mahasiswa aktif antara tahun 2017 dengan 2021 adalah sebesar 49,36 %, jika dinominalkan dalam angka pada tahun 2017 jumlah mahasiswa aktif adalah sebanyak 4.512 Mahasiswa dan jumlah mahasiswa aktif pada tahun 2021 sebanyak 6.739 Mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya terhadap layanan Pendidikan yang disediakan oleh Polnep. Akreditasi Institusi mendapatkan nilai B atau baik sekali. Akreditasi B telah diperoleh sejak tahun 2017. Polnep berupaya keras untuk meningkatkan tata kelolanya di level institusi maupun di level prodi. Karena salah satu syarat untuk

mendapatkan akreditasi Unggul pada tingkat institusi adalah jumlah akreditasi prodi minimal 80% dari jumlah total prodi yang dimiliki oleh institusi. Sampai dengan tahun 2021, jumlah prodi di Polnep sebanyak 28 Prodi. Jumlah Program Studi Berakreditasi 'A' sebanyak 1 Prodi, Jumlah Program Studi Berakreditasi 'B' sebanyak 17, berakreditasi 'Baik' sebanyak 5, Jumlah Program Studi Berakreditasi 'C' sebanyak 4 prodi, dan Jumlah Program Studi Dalam Proses (DP) Akreditasi sebanyak 1 prodi. Prodi yang belum mendapatkan akreditasi adalah prodi prodi yang baru dijalankan dan baru akan meluluskan mahasiswa pada tahun 2022 sehingga perlu persyaratan –persyaratan yang harus dilengkapi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas tata kelola dalam pelaksanaan proses belajar mengajar telah dilakukan dengan baik sekali. Untuk memberikan kemudahan dan akses pemerataan pendidikan, Polnep menyediakan beberapa beasiswa baik untuk mahasiswa berprestasi maupun mahasiswa yang kurang mampu dalam hal ekonomi, yang bekerjasama dengan pemerintah maupun swasta di luar beasiswa ADIK, BBP- PPA, BIDIK MISI.

Dari segi prestasi, dapat terlihat bahwa mahasiswa dari Polnep mampu bersaing dengan mahasiswa dari kampus lainnya, baik dari tingkat provinsi maupun nasional. Polnep mengalami peningkatan dalam perolehan prestasi mahasiswa di tingkat provinsi dan nasional. Pada tahun 2017 hingga 2021, mahasiswa Polnep mendapatkan prestasi tingkat nasional secara berturut-turut 1, 46, 5, 9, 36 prestasi. Pada tingkat internasional mendapatkan 1 prestasi pada tahun 2018 dan 2019.

Peningkatan jumlah mahasiswa asing berasal dari program student exchange dengan *University Cergy-Pontoise*, Prancis, *IUT Lille A*, Prancis *University Cergy-Pontoise*, Prancis, *IUT Lille A*, Prancis, *Université du Littoral Côte d'Opale* dan *IUT Lille A*, Prancis dan juga Politeknik Mukah Sarawak (PMU), Malaysia. Sejalan dengan peningkatan kualitas program *student exchange*, jumlah mahasiswa

asing yang berminat belajar selama 1 semester di Polnep semakin meningkat. Komitmen Polnep dalam meningkatkan kompetensi lulusannya juga terlihat pada persentase mahasiswa yang memiliki sertifikat Bahasa Inggris yang meningkat secara signifikan dari tahun 2017-2021, dengan jumlah presentase 42,62%. Ini menjadi modal bagi mahasiswa untuk dapat memenuhi kebutuhan DUDIKA dan melanjutkan studi yang menuntut penguasaan bahasa asing.

b. Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Secara total alokasi dana penelitian sampai tahun 2021 mengalami peningkatan laju peningkatan pendanaan dari tahun 2017 sampai tahun 2021 adalah sebesar 5% hal ini menunjukkan bahwa Polnep komitmen terhadap pelaksanaan tri dharma Pendidikan Tinggi. Hal tersebut berpengaruh kepada jumlah kegiatan pengabdian yang juga mengalami fluktuasi. Skema-skema yang tersedia untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat memang tidak sebanyak skema penelitian. Hal ini berpengaruh terhadap kinerja pengabdian kepada masyarakat. Akan tetapi, saat ini, salah satu indikator kinerja utama adalah adanya hasil penelitian atau kegiatan dosen yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, Polnep terus mendorong agar kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen menghasilkan output yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Trend perubahan per tahun kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Negeri Pontianak dari tahun 2017 sampai dengan 2021 yaitu rata-rata dari tahun 2017 ke 2018 menurun sebesar 21,15 %, 2018 ke 2019 meningkat sebesar 22,9%, 2019 ke 2020 meningkat sebesar 57,96% dan 2020 ke 2021 menurun sebesar 7,55 % baik dari sisi pendanaan maupun dari jumlah kegiatan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan Masyarakat kepada Politeknik Negeri Pontianak sangat tinggi dan merupakan peluang berharga bagi Politeknik Negeri Pontianak dalam pelaksanaan program-program sinergisnya. Berdasarkan capaian IKU tahun 2020 dan 2021 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil



mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat dengan jumlah karya dosen melalui indek scopus mencapai 6, Kutipan karya ilmiah mencapai 1027 kutipan melalui aplikasi Sim SINTA Jika diakumulasikan jumlah keluaran peneltian scopus dan pengabdian kepada masyarakat karya dibagi jumlah dosen maka teralisasi sebesar 0.020 dan Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra tahun 2020-2024 yang mencapai 0,18, maka kinerja tahun 2021 baru mencapai 11,11%. Keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendapat rekognisi internasional masih sangat rendah dikarenakan beberapa permasalahan yang mencakup:

- 1) SDM dalam hal ini adalah Dosen yang melakukan penelitian belum memiliki kepercayaan yang tinggi dalam mempublikasikan keluaran penelitiannya melalui jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi;
- 2) Sarana dan Prasarana, khususnya laboratorium uji tempat dimana Dosen melakukan pengujian penelitian belum terakreditasi atau bersertifikasi SNI ISO/IEC 17025:2008, sehingga hasil penelitian atau pengujian belum dapat dibandingkan atau menjadi rujukan; dan
- 3) Dokumen dan Sistem, dalam hal ini pedoman penelitian belum mensyaratkan bahwa keluaran penelitian harus sudah bisa diterapkan dan/atau dipublikasikan melalui jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional, oleh karena itu perlu itu kedepan harus dilakukan perbaikan pada indikator ini.

Program pengabdian pada masyarakat (PPM) merupakan suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam penerapan dan pengembangan hasil-hasil riset perguruan tinggi. Kegiatan pelaksanaan PPM yang dikembangkan oleh Polnep bersifat problem solving, bermakna, tuntas dan berkelanjutan yang dapat diterapkan secara langsung oleh masyarakat/industri. Dalam pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat pada Politeknik Negeri Pontianak dapat memenuhi standar arah sesuai dengan visi dan misi

Politeknik Negeri Pontianak, standar proses harus dilaksanakan berdasarkan rencana kerja untuk peningkatan Pengabdian Pada Masyarakat di Kalimantan Barat. Standar hasil merupakan keberhasilan dalam menerapkan dan atau menciptakan inovasi teknologi sebagai upaya untuk membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat secara mandiri.

Politeknik Negeri Pontianak mendapat hibah penelitian dari luar negeri yaitu dengan *Nanyang Technological University*, Singapura pada tahun 2018 dan *University of Leicester*, Inggris pada tahun 2020 dengan judul penelitian *APTIS General Writing Test Task 4: An Analysis of Test-Takers Pragmatic Performance and Cognitive Processing* yang didanai oleh British Council dan Solarboost: *Boosting solar energy capacity of Indonesia without compromising protected areas* yang didanai oleh Newton Fund.

c. Kerja Sama

Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja kerjasama tahun 2017 – 2021 Jumlah mitra dan implementasi kerjasama dalam negeri maupun luar negeri meningkat cukup tajam sesuai data. Jumlah MoU dalam negeri yang efektif berjalan meningkat rata rata setiap tahun sebesar 37,5% dan jumlah MoU Luar negeri yang efektif berjalan meningkat lebih dari 100 % dari 12 MoU pada Tahun 2017 menjadi 45 MoU pada Tahun 2021. Mitra kerjasama Polnep terdiri dari berbagai instansi baik instansi Pemerintah, BUMN, Perguruan Tinggi, Industri & juga Masyarakat umum. Untuk menuju Polnep yang berdaya saing internasional maka Polnep juga menjalin kerja sama dengan mitra dari luar negeri, adapun mitra kerja sama dari luar negeri yang aktif sampai sekarang adalah sebagai berikut : *Universite De Cergy Pontoise*, *University Of Artois* , *Guiyang Vocational And Technical College*, P.R. China *Guizhou Jiao Tong College*, P.R. China, *Guizhou Institute Of Technology*, P.R. China *Tongren Polytechnic College*, P.R. China, *Guizhou Polytechnic Of Constuction*, P.R. China, *Universite Littoral Cote D'opale (Ulco)*, *Universite De Lorraine*, *Universite De Lille*, *Universite De Cergy*

Pontoise, Universite De Lorraine, *Management And Science University*, Malaysia Politeknik Mukah Sarawak, Stuts, Taiwan Kolej Vokasional Matang, Kementerian Pendidikan Malaysia, *Management & Science University*, Among Colleges, *Polytechnics, Universities Of* Indonesia-Philippines-Thailand-Vietnam, *South Metropolitan Tafe*, Chung Cheong University. Mengacu data diatas menunjukkan bahwa Politeknik Negeri Pontianak mendapatkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari berbagai pihak baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, oleh karena itu ini merupakan kekuatan dan peluang untuk menjadi politeknik yang unggul.

d. Evaluasi Kinerja Keuangan

Sumber dan penggunaan dana yang digunakan oleh Politeknik Negeri Pontianak terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak, Rupiah Murni, dan Hibah. Perkembangan penerimaan yang bersumber dari PNBPN secara nominal relatif meningkat dengan cukup signifikan.

Realisasi Hibah yang umumnya berasal dari PEMDA untuk pendanaan operasional PDD dan PSDKU sangat tergantung pada realisasi pendapatan daerah yang yang tentunya diluar kendali POLNEP selaku penerima hibah, sehingga sangat besar kemungkinan anggaran yang diajukan akan mengalami koreksi pada saat realisasinya.

NO.	URAIAN	REALISASI				
		2017	2018	2019	2020	2021
PENERIMAAN						
1.	PNBP	Rp17.498.787.273	Rp20.444.839.098	Rp26.805.274.991	Rp29.879.114.377	Rp29.680.250.786
2.	RM	Rp52.889.211.314	Rp58.076.263.284	Rp59.974.386.906	Rp73.237.841.233	Rp75.410.493.044
BELANJA						
1.	PNBP	Rp20.206.454.847	Rp21.481.776.614	Rp25.900.247.450	Rp28.278.375.372	Rp27.742.389.535
2.	RM	Rp50.755.925.471	Rp62.240.274.446	Rp62.179.884.309	Rp73.237.841.233	Rp75.410.493.044

Tabel 11. Realisasi Penerimaan dan Belanja Tahun 2017-2021

Realisasi Penerimaan PNBPN pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 16,84% dari tahun 2017, tahun 2019 semakin meningkat yaitu sebesar 31.11% dari tahun 2018, begitu juga pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 11,47% dari

tahun 2019. Tren peningkatan PNBPN berkaitan dengan pemberlakuan UKT mulai tahun 2013 dan seiring dengan bertambahnya jumlah mahasiswa (*student body*). Untuk penerimaan yang bersumber dari hibah secara umum berfluktuasi tiap tahunnya. Namun pada tahun 2021 penerimaan PNBPN mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 0,67% ini dikarenakan pada Tahun Anggaran 2021 Politeknik Negeri Pontianak tidak memiliki pendapatan dari pemanfaatan BMN. Realisasi belanja pegawai tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 6,11 persen dari 31 Desember 2020. Kenaikan realisasi belanja pegawai ini disebabkan adanya kenaikan Gaji PNS serta bertambah baiknya kinerja pegawai baik dari sisi kinerja, perilaku dan disiplin pegawai yang dapat dilihat dari kenaikan Tunjangan Kinerja tenaga kependidikan.

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar 7,48 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2020, hal ini disebabkan pagu anggaran belanja barang pada Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar 49,98% dibandingkan 31 Desember 2020, hal ini disebabkan adanya penurunan anggaran belanja modal pada tahun 2021.

e. Evaluasi Kinerja SDM

Berdasarkan evaluasi kinerja bidang SDM sejak tahun 2017 sampai tahun 2021. Pada tahun 2021, jumlah tenaga dosen menurut status kepegawaian terdiri dari: PNS sebanyak 298 orang (88,69%), selebihnya merupakan dosen PNP (Non PNS) sejumlah 38 orang (11,31%). Polnep menerima 54 dosen baru sehingga pada tahun 2019 – 2020 terjadi peningkatan CPNS. Terjadi penurunan untuk dosen CPNS/PNS dikarenakan meninggal dan pensiun dan untuk tahun 2021 terdapat penambahan jumlah dosen dari instansi luar Polnep. Untuk PNP terjadi penurunan pada tahun 2020 karena berhenti ataupun diterima CPNS pada instansi yang lain.

Berdasarkan evaluasi kinerja bidang SDM sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 jika dilihat dari jenjang pendidikan terdiri dari: 310 orang (92%) berpendidikan S2, dan 26 orang (8%) berpendidikan S3. Perkembangan tingkat pendidikan tenaga dosen khususnya S1 pada tahun 2017 dengan jumlah yang cukup besar (19 dosen), namun dengan peraturan kualifikasi pendidikan dosen, seluruh dosen dengan tingkat pendidikan S1 sudah menyelesaikan studi S2 pada tahun 2020. Sedangkan, tingkat pendidikan dosen dengan kualifikasi S3 pada tahun 2017 Polnep baru memiliki 16 dosen, dalam jangka 3 tahun berikutnya Polnep sudah mendapatkan 26 dosen dengan kualifikasi S3. Terjadi penurunan jumlah dosen di tahun 2020 untuk dosen PPNPN karena berhenti ataupun diterima CPNS pada instansi yang lain.

Berdasarkan evaluasi kinerja bidang SDM tahun sejak tahun 2017 sampai tahun 2021. Jumlah tenaga dosen PNS menurut jabatan fungsional terdiri dari: Pada tahun 2021 jumlah tenaga dosen PNS menurut jabatan fungsional terdiri dari: Belum Fungsional sebanyak 27 orang, Asisten Ahli sebanyak 97 orang, Lektor sebanyak 110 orang, Lektor Kepala sebanyak 100 orang, dan Guru Besar sebanyak 2 orang. Pada tahun 2019 jumlah tenaga pengajar belum fungsional meningkat sebanyak 60 orang, dikarenakan pada tahun 2019 Polnep merekrut sejumlah dosen baru. Pada tahun 2021, dosen tersebut telah mendapatkan jabatan fungsional, sehingga yang tersisa (17 dosen) yang belum mendapatkan jabatan fungsional adalah dosen baru pada tahun 2020 dan 2021. Untuk jabatan fungsional lektor kepala (LK) pada tahun 2021 menurun karena terdapat beberapa dosen yang pensiun dan meninggal dunia. Berdasarkan capaian IKU tahun 2020 dan 2021, Jumlah Dosen berkualifikasi S3 tahun 2021 berjumlah 26 Dosen atau 8 % dari jumlah total dosen yang mencapai 336 orang jumlahnya belum bertambah karena beberapa dosen sedang proses penyelesaian perkuliahan, Jumlah Dosen yang berkegiatan tri dharma di kampus lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri,

atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir, ditargetkan 50 dosen dan terealisasi mencapai 76 dosen. Jumlah dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat; kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja, ditargetkan 100 dosen dan terealisasi 141 dosen, Politeknik Negeri Pontianak akan mendorong seluruh dosen untuk terlibat dalam program merdeka belajar dan akan terus menambah jumlah kerjasama dengan industri.

Tenaga Kependidikan dari tahun 2017 s.d 2021 mengalami peningkatan jumlah personil secara berturut-turut; 269, 299, 320, 335, 351 personil. Dengan demikian pelayanan yang diberikan menjadi lebih optimal.

Rasio antara dosen dengan mahasiswa pada tahun 2021 adalah 1:22,6 dan Rasio jumlah Tendik dan mahasiswa pada tahun 2021 adalah 1:19,19. Dengan kondisi rasio tersebut, Polnep sudah cukup ideal dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa. Untuk sementara waktu Polnep tidak perlu melakukan rekrutmen pegawai, dan sebagai upaya peningkatan pelayanan maka Polnep perlu melakukan digitalisasi pelayanan.

f. Evaluasi Kinerja Sarana dan Prasarana

Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja aspek sarana dan prasarana menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2017 untuk aset berupa Tanah dengan sertifikat hak milik Polnep adalah seluas 312.848,00 M<sup>2</sup>, Peralatan Dan Mesin sebanyak 37.310 Unit dimana peralatan dan mesin secara kuantitas jumlahnya bertambah dari tahun 2017 sd 2021, Gedung dan Bangunan 76 unit (Gedung pendidikan 7 unit, Gedung Laboratorium 31 unit, Gedung Layanan dan Kantor 38 unit), Jalan Dan Jembatan sepanjang 10.996 M<sup>2</sup>, Irigasi sebanyak 6 Unit, Jaringan sebanyak 11 Unit, Aset Tetap Lainnya sebanyak 13.351

buah, Aset Tetap Yang Tidak Digunakan sebanyak 1 Unit. Kelayakan aset yang dimiliki Politeknik Negeri Pontianak masih dapat dipergunakan secara optimal baik untuk proses pembelajaran maupun pelayanan publik. Namun, dikarenakan Polnep masih satker biasa, maka tidak ada keleluasaan dalam pengelolaan hasil dari penggunaan aset tersebut.

## **2. Potensi dan Permasalahan**

Adapun potensi yang dimiliki oleh Politeknik Negeri Pontianak antar lain:

1. Berdasarkan penilaian Kemendikbudristek, realisasi tahun 2018 hasil penilaian kinerja tahun 2017, Polnep masuk dalam Peringkat Perguruan Tinggi Kelompok Politeknik Terbaik (Kluster 1) dengan peringkat umum berada diposisi 10. Dari realisasi tersebut, maka capaian kinerja tahun 2018 mencapai 100%.
2. Berdasarkan hasil pemeringkatan yang dilakukan melalui system webometric pada bulan Januari 2019, posisi Polnep berada di rengking 5.149 Dunia, peringkat 23 Politeknik di tingkat Asia, peringkat 7 Politeknik ditingkat Asia Tenggara, peringkat 3 Politeknik se Indonesia, dan peringkat 1 Politeknik se Kalimantan.
3. Mendapatkan peringkat kedua Penilaian LKKL Tingkat Wilayah Kategori UAPPA-W Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Prov Kalimantan Barat pada Tahun 2020.
4. Juara 2 pada Porseni Politeknik se-Indonesia ke XIII 2022 di Politeknik Negeri Banjarmasin dengan perolehan medali yaitu 11 emas, 6 perak dan 12 perunggu.
5. Setiap lulusan di Polnep mendapatkan sertifikat kompetensi BNSP sesuai bidangnya sebagai pendamping ijazah.
6. Kewirausahaan menjadi mata kuliah wajib di semua prodi Polnep dan didukung Program Mahasiswa Wirausaha (PMW).

## **3. Analisis SWOT**

Kinerja Polnep dianalisis menggunakan analisis SWOT, yang memperhitungkan baik kondisi lingkungan internal (kinerja pelayanan



Tridharma, Keuangan, SDM, Sarana dan Prasarana, Inovasi, dan Investasi) maupun kondisi lingkungan eksternal yang mempengaruhi dalam menjalankan Tugas tridharma yaitu lingkungan makro dan lingkungan industri (bidang pendidikan). Berdasarkan hasil analisis SWOT, selisih nilai Strengths (S) dan Weaknesses (Weakness/W) adalah 0,942, dan selisih antara Opportunity/P dan Challenges (Threat/T) adalah 1,430, Lampiran 2 berisi analisis SWOT secara lebih rinci.

Dengan demikian, posisi Polnep dalam matrik *grand strategy* berada pada Kuadran I yaitu posisi strategis untuk tumbuh dan berkembang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dengan memanfaatkan sumber daya kompetitif internal dan memanfaatkan peluang untuk menghadapi segala ancaman yang ada. Posisi yang paling menguntungkan berada di Kuadran 1. Hal ini berimplikasi pada tersedianya pilihan strategi pengembangan, serta penentuan strategi yang secara umum ditujukan untuk memanfaatkan kekuatannya dengan memanfaatkan peluang bisnis yang ada. Dalam situasi ini, kebijakan pertumbuhan yang progresif (strategi berorientasi peningkatan) digunakan untuk mengembangkan program kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Strategis. Gambar 2 menggambarkan posisi Polnep dalam matriks strategi besar



Gambar 2. Posisi POLNEP pada Kuadran I *Matrix Grand Strategy*

Berdasarkan gambar diatas, POLNEP diharapkan mampu untuk mengoptimalkan kesempatan yang ada melalui pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas, yang tentunya dapat dicapai melalui transformasi satker menjadi BLU. Fleksibilitas oprasional sebagai ciri BLU akan memberikan ruang kreatifitas lebih kepada sumberdaya manusia yang dimiliki POLNEP untuk meningkatkan sistem manajemen dalam memberikan pelayanan publik agar mampu menghasilkan pelayanan yang lebih bermutu dan sesuai dengan kebutuhan penggunaanya.

#### 4. Startegi SWOT

	<b>Kekuatan (S)</b>	<b>Kelemahan (W)</b>
	1. Pertumbuhan Pendapatan (PNBP) dan asset fisik Cukup Tinggi	1. Efisiensi Penggunaan Dana
	2. Fasilitas Belajar Mengajar di Kelas/Teori Memadai	2. Dana Internal untuk Pembangunan Pendidikan Terbatas
	3. Tersedianya Fasilitas Beasiswa Pemerintah dan Swasta	3. Pengabdian Masyarakat Belum Memberikan Manfaat yang Signifikan pada Kesejahteraan Masyarakat
	4. Tersedianya Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Bagi Mahasiswa/Lulusan	4. Kerjasama Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak untuk Generasi Pendapatan Kurang Optimal
	5. Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui Implementasi SPMI dan Mutu Eksternal melalui Akreditasi BAN-PT	5. Unit-unit usaha yang belum berjalan dengan optimal
	6. Evaluasi Kurikulum & Silabus untuk Meningkatkan Relevansinya terhadap Kebutuhan Dunia Usaha dan Industri	6. Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kependidikan
	7. Tersedianya Fasilitas Tempat Uji Kompetensi (TUK)	7. Hasil Penelitian Belum Termanfaatkan
	8. Pengembangan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam Bidang-bidang Bersertifikat Keahlian	8. Kemampuan Mengimbangi Kecepatan Perkembangan Teknologi Rendah
<b>Peluang (O)</b>	<b>Strategi S-O</b>	<b>Strategi W-O</b>
1. Perhatian yang Besar dari Pemerintah Pusat terhadap Pentingnya Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi	Meningkatkan akses pemerataan, mutu, serta relevansi pendidikan tinggi vokasi	Meningkatkan kemampuan Polnep baik pengelolalan, proses business, dan pelaksanaan pelatihan, penyuluhan, pendampingan dan pengembangan produk dan jasa lainnya

secara Berkelanjutan		
2. Indonesia akan mendapat anugerah bonus demografi dalam rentang waktu 2020- 2035 menciptakan peluang bagi Polnep mempersiapkan SDM terlatih	Meningkatkan kualitas proses dan hasil kegiatan kemahasiswaan dan kewirausahaan	Mengembangkan lembaga yang fokus dalam pemanfaatan potensi Polnep untuk menghasilkan peluang bisnis (income generator)
3. Kota Pontianak sebagai salah satu Kota Pendidikan di Kalimantan Barat	Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pendidikan tinggi khususnya pendidikan tinggi Vokasi antara lain dengan meningkatkan jumlah mahasiswa penerima beasiswa	Menyiapkan tim untuk peningkatan kerjasama dengan lembaga/instansi lain khususnya dalam hal penyediaan beasiswa.
4. Kebijakan Kampus Merdeka diartikan sebagai bentuk pemberian kebebasan secara otonom dan merdeka dari birokrasi yang berbelit kepada Perguruan Tinggi salah satunya Polnep	Mewujudkan tata kelola pendidikan dalam rangka reformasi birokrasi	Mendata secara detail praktek apa saja yang bisa digunakan untuk membuat barang jasa produksi
5. Sebagai salah satu PT Vokasi, Polnep berhak melaksanakan Program Link and Match dengan DUDIKA	Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kelembagaan Polnep	Meningkatkan jaringan kerjasama dengan industri
6. Kebutuhan dan Kepercayaan Dunia Usaha dan Indutri terhadap lulusan Politeknik	Meningkatkan kualitas penjaminan mutu kegiatan tridharma	Mendata secara detail semua peralatan bengkel, laboratorium yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan ketrampilan mahasiswa/lulusan.

7. Kebutuhan Dunia Usaha dan Industri terhadap Hasil-hasil Penelitian Bernilai Komersial	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas Penelitian Terapan dan Pengabdian pada Masyarakat, serta produk inovasi	Mendata secara detail semua peralatan laboratorium sehingga dapat diproyeksikan pengondisiannya pada kemampuan optimal sesuai standar industri selain itu akan mampu mendukung kegiatan penelitian inovatif bagi dosen dan Tendik.
8. Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Variasi Bisnis dan Pemanfaatannya dalam Seluruh Aspek Kehidupan Menciptakan Kebutuhan akan Penguasaan dan Penerapannya untuk Menghadapi Tuntutan Global	Mewujudkan kerjasama saling menguntungkan di bidang pembelajaran, riset, teknologi, serta bidang lainnya baik di level nasional maupun internasional	Mencari mitra kerjasama potensial baik dalam dan luar negeri dalam peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar dan penelitian
<b>Tantangan (T)</b>	<b>Strategi S-T</b>	<b>Strategi W-T</b>
1. Ancaman Masuknya Tenaga Trampil Menengah dan Tenaga Ahli dari Negara- negara Lain	Melakukan peningkatan kapasitas Dosen, Teknisi dan Tendik.	Membuka peluang kerjasama antara prinsipal alat untuk maintenance dengan program pelatihan teknisi
2. Semakin Ketatnya (rigid) Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Penggunaan Dana Pemerintah dalam Rangka Terwujudnya Peningkatan Kinerja, Keterbukaan/ Transparansi, dan Akuntabilitas Satuan Kerja.	Mendorong pemerintah untuk sosialisasi sistem pendidikan vokasi di tingkat nasional, regional dan internasional.	Memberi masukan ke pemerintah tentang rigiditas dana pemerintah untuk pendidikan

3. Dampak Negatif Globalisasi terhadap Nilai-nilai Sosial dan Budaya Asli Bangsa Indonesia	Melakukan sosialisasi dengan mengundang narasumber narasumber terkait dampak negative globalisasi.	Melakukan sosialisasi dengan mengundang narasumber narasumber terkait Nilai-nilai Sosial dan Budaya Asli Bangsa Indonesia.
4. Besarnya Tuntutan terhadap Peningkatan Kualitas Hasil, Akuntabilitas, Transparansi, Efisiensi, dan Efektifitas Penyelenggaraan Pendidikan	Meningkatkan mutu dan serapan lulusan dalam menghadapi dunia kerja	Meningkatkan akreditasi institusi dan Program studi
5. Tuntutan era revolusi industri 4.0, lulusan tidak cukup menguasai literasi lama tetapi harus mulai menguasai literasi baru	Meningkatkan sosialisasi program unggulan Polnep	Meningkatkan daya saing dosen dan lulusan dengan melibatkan DUDIKA Internasional
6. DUDIKA harus benar-benar dihadirkan dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma di Polnep	Melakukan link and match dengan industri.	Melibatkan DUDIKA nasional bersama-sama dalam mengelola pendidikan vokasi.
7. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perguruan Tinggi-perguruan tinggi Pesaing	Memsertifikasi dosen dan lulusan bertaraf internasional (bahasa, IT dan keahlian yang relevan)	Meningkatkan kualitas tri dharma PT secara berkelanjutan.
8. Kemajuan teknologi yang berlangsung cepat menuntut Polnep mengembangkan roadmap rencana strategis	Perencanaan fasilitas di Polnep mengikuti perkembangan ipteks.	Meningkatkan kerjasama peningkatan kapasitas teknologi dengan industri maju.

Gambar 3. Strategi SWOT

Berdasarkan hasil Analisis matriks SWOT dan perhitungannya telah disimpulkan bahwa strategi yang tepat dalam pengembangan POLNEP adalah strategi SO yaitu memaksimalkan kekuatan dan peluang sekaligus (progressive strategy), mencakup:

1. Meningkatkan akses pemerataan, mutu, serta relevansi pendidikan tinggi vokasi.
2. Meningkatkan kualitas proses dan hasil kegiatan kemahasiswaan dan kewirausahaan.
3. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pendidikan tinggi khususnya pendidikan tinggi Vokasi antara lain dengan meningkatkan jumlah mahasiswa penerima beasiswa.

4. Mewujudkan tata kelola pendidikan dalam rangka reformasi birokrasi.
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kelembagaan Polnep.
6. Meningkatkan kualitas penjaminan mutu kegiatan tridharma.
7. Meningkatkan kuantitas dan Kualitas Penelitian Terapan dan Pengabdian pada Masyarakat, serta produk inovasi.
8. Mewujudkan kerjasama saling menguntungkan di bidang pembelajaran, riset, teknologi, serta bidang lainnya baik di level nasional maupun internasional.

## **5. Inisiatif Strategis**

Berdasarkan hasil analisis SWOT serta dengan memperhatikan sasaran pembangunan sumberdaya manusia dan IPTEK pada pendidikan tinggi vokasi yang *Link and Match* dengan dunia usaha dan dunia industri, Polnep telah menyusun strategi sebagai berikut:

- a. Menghasilkan lulusan berakhlak mulia, cinta tanah air, memiliki keunggulan kompetensi berjiwa *enterpreneur*, dan kemampuan *soft skill*.
- b. Menghasilkan karya penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi terhadap peningkatan daya saing bangsa dan negara di dunia internasional.
- c. Meningkatkan kualitas kerjasama kelembagaan dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu kelembagaan secara berkelanjutan yang bertaraf nasional dan internasional.
- d. Memberikan pelayanan kepada publik yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan dengan sistem dan standar mutu yang tinggi

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **A. VISI**

Mengacu pada Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mencanangkan VISI 2025 “Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)”. Searah dengan Visi Kemdikbud tersebut, maka sebagai subordinat kelembagaan, Politeknik Negeri Pontianak memprioritaskan kebijakan dan kinerja menjadi Politeknik yang unggul dalam mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing kompetitif dengan berkompotensi yang tinggi. Terkait dengan upaya mewujudkan cita-cita tersebut, dirumuskan Visi (RENSTRA) Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

#### **PADA TAHUN 2024 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI VOKASI YANG MEMILIKI DAYA SAING NASIONAL DAN INTERNASIONAL**

Memperhatikan visi Politeknik Negeri Pontianak di atas, dapat dimaknai bahwa:

1. **Tahun 2024**, merupakan waktu yang ditetapkan bagi Politeknik Negeri Pontianak pada periode (RENSTRA) ini untuk menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi dalam mencapai visi yang diinginkan.
2. **Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi**, adalah Politeknik Negeri Pontianak sebagai penyelenggara pendidikan tinggi vokasi yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan tertentu meliputi program diploma, sarjana terapan, magister terapan, hingga doktor terapan dalam berbagai bidang ilmu dan keahlian.
3. **Berdaya Saing** memprioritaskan, bahwa dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, &



pengabdian kepada masyarakat, berlandaskan pada keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Memiliki keunggulan kompetitif berarti Politeknik Negeri Pontianak memiliki keunggulan untuk mampu bersaing dengan perguruan tinggi vokasi lainnya. Implikasinya adalah Politeknik Negeri Pontianak lebih diakui secara nasional dan internasional. Keunggulan komparatif artinya bahwa Polnep mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya, sehingga memiliki nilai pembandingan yang lebih dari perguruan tinggi vokasi lainnya di tingkat nasional dan internasional.

4. **Nasional**, adalah bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, dalam hal ini Politeknik Negeri Pontianak berada di Provinsi Kalimantan Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. **Internasional**, adalah menyangkut bangsa atau negeri seluruh dunia, dalam hal ini Politeknik Negeri Pontianak berada dalam kawasan Asia Tenggara.

Visi yang telah dicanangkan tersebut, bukan sekadar slogan normatif dan dekoratif, tetapi menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam penyusunan kebijakan kelembagaan dan penyusunan rencana anggaran dan kegiatan, serta seluruh aktivitas yang dilaksanakan di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak.

## **B. MISI**

Perwujudan Visi Politeknik Negeri Pontianak diimplementasikan melalui beberapa rumusan misi, sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang didukung sumber daya berstandar nasional dan internasional.
2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang kreatif dan inovatif yang hasilnya dapat dimanfaatkan langsung oleh industri, dunia usaha (IDUKA), dan menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Menjalin dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai kelembagaan, institusi pemerintah, dan swasta baik dalam maupun luar negeri.

4. Mewujudkan tata kelola lembaga secara transparan dan akuntabel melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

### C. TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Tujuan yang akan diwujudkan Politeknik Negeri Pontianak sesuai dengan rumusan misi adalah untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berakhlak mulia, cinta tanah air, memiliki keunggulan kompetensi berjiwa *entrepreneur*, dan kemampuan *soft skill*.
2. Menghasilkan karya penelitian terapan yang berkontribusi terhadap peningkatan daya saing bangsa dan negara di dunia internasional, dan memberikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas kerjasama kelembagaan dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu kelembagaan secara berkelanjutan yang bertaraf nasional dan internasional.
4. Memberikan pelayanan kepada public yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan dengan system dan standar mutu yang tinggi.

Berdasarkan capaian renstra Politeknik Negeri Pontianak periode 2015 – 2019 yang telah dilaksanakan, Indikator Kinerja Tujuan yang akan dicapai dalam Renstra Politeknik Negeri Pontianak 2020 – 2024 seperti pada tabel.

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET 2024
1.	Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, cinta tanah air, memiliki keunggulan berjiwa <i>enterpreneur</i> , dan kemampuan <i>softskill</i>	Persentase Lulusan yang bekerja atau mendapatkan pekerjaan dalam 6 bulan setelah kelulusan	52,60%
2.	Menghasilkan karya penelitian terapan yang berkontribusi terhadap peningkatan daya saing bangsa dan negara di dunia internasional, dan memberikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan ke masyarakat, mendapat Paten/HKI, dan dipublikasi melalui jurnal yang terindeks nasional/ internasional	45,00%

3.	Meningkatkan kualitas kerjasama kelembagaan dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu kelembagaan secara berkelanjutan yang bertaraf nasional dan internasional	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	150%
4.	Memberikan pelayanan kepada publik yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan dengan sistem dan standar mutu yang tinggi	Penilaian stakeholder terhadap mutu layanan oleh KEMENPANRB melalui Predikat Zona integritas (WBK dan/WBBM)	WBK

Tabel 12. Indikator Kinerja Tujuan yang akan dicapai dalam Renstra Polnep 2020-2024

#### **D. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN**

Sasaran strategis yang akan ditingkatkan maupun dikembangkan oleh Politeknik Negeri Pontianak meliputi:

1. Lulusan berakhlak mulia, cinta tanah air, memiliki keunggulan kompetensi berjiwa entrepreneur, dan kemampuan soft skill.
2. Karya penelitian terapan yang berkontribusi terhadap peningkatan daya saing bangsa dan negara di dunia internasional, dan memberikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Kualitas kerjasama kelembagaan dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu kelembagaan secara berkelanjutan yang bertaraf nasional dan internasional.
4. Pelayanan kepada public yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan dengan system dan standar mutu yang tinggi.

Indikator Kinerja Sasaran pada renstra Politeknik Negeri Pontianak 2020 – 2024 ini mengacu pada Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023, sasaran yang akan dicapai dan indikator kinerja Perguruan Tinggi termasuk disajikan pada tabel berikut:

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/UTAMA
1.	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU 1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta
		IKU 1.2 Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi
2.	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU 2.1 Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi
		IKU 2.2 Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri
		IKU 2.3 Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen
3.	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	IKU 3.1 Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1
		IKU 3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis project ( <i>team-based project</i> ) sebagai bagian dari bobot evaluasi
		IKU 3.3 Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah
4.	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	IKU 4.1 Predikat SAKIP
		IKU 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L
		IKU 4.3 Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75

Tabel 13. Indikator Kinerja Sasaran pada Renstra Polnep

### **BAB III**

## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

### **A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Arah kebijakan dan strategi disusun dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan mencapai tujuan kelembagaan yaitu:

- a. Arah kebijakan dan strategi mencapai sasaran strategis pada Misi 1 (M1) dan Tujuan 1 (T1): *Menghasilkan lulusan berakhlak mulia, cinta tanah air, memiliki keunggulan kompetensi berjiwa enterpreneur, dan kemampuan soft skill.*
  1. Indikator sasaran strategis: Persentase lulusan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran program tersebut melalui:
    - a) Meningkatkan jumlah Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun;
    - b) Meningkatkan jumlah lulusan yang melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi; dan
    - c) Meningkatkan jumlah mahasiswa yang menjalankan wirausaha.
  2. Indikator sasaran strategis: Persentase lulusan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran program tersebut melalui:
    - a) Meningkatkan persentase lulusan D4/D3/D2 dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus; dan
    - b) Meningkatkan jumlah peserta didik mengikuti kompetisi yang dilaksanakan di tingkat nasional dan internasional.
  3. Indikator sasaran strategis: Persentase mata kuliah D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case*

*method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi.

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran program tersebut melalui meningkatkan jumlah model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dan berbasis hasil asesmen.

- b. Arah kebijakan dan strategi mencapai sasaran strategis pada Misi 2 (M2), Tujuan 2 (T2) *“Menghasilkan karya penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi terhadap peningkatan daya saing bangsa dan negara di dunia internasional”*

1. Indikator sasaran strategis: Jumlah keluaran penelitian yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat.

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran program tersebut melalui:

- a) Meningkatkan jumlah publikasi (artikel) Internasional;
  - b) Meningkatkan jumlah sitasi di jurnal Internasional;
  - c) Meningkatkan jumlah *prototype*;
  - d) Meningkatkan jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan dari hasil litbang; dan
  - e) Meningkatkan paten yang dihilirkan ke industri/dipakai di masyarakat.
2. Indikator sasaran strategis: Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.
- Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran program tersebut melalui:
- a) Meningkatkan jumlah dosen yang meningkat kualifikasi akademiknya;
  - b) Meningkatkan jumlah dosen yang mengikuti sertifikasi kompetensi; dan
  - c) Meningkatkan jumlah dosen dari praktisi profesional.

- c. Arah kebijakan dan strategi mencapai sasaran strategis pada Misi 3 (M3), Tujuan 3 (T3). *“Meningkatkan kualitas kerjasama kelembagaan dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu kelembagaan secara berkelanjutan yang bertaraf nasional dan Internasional”*.

1. Indikator sasaran strategis: Persentase program studi D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran program tersebut melalui: meningkatkan jumlah program studi yang melakukan kerjasama kurikulum dengan dunia industri/dunia usaha/PT QS Rank 100

2. Indikator sasaran strategis persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain; di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 *by subject*); bekerja sebagai praktisi di dunia industri; atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima).

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran program tersebut melalui:

- a) Meningkatkan jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan/magang/bekerja di luar negeri dan/atau dalam industri; dan
- b) Meningkatkan jumlah peserta didik yang mengikuti kompetisi internasional. Mengoptimalkan jasa layanan kompetensi dosen sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.

- d. Arah kebijakan dan strategi mencapai sasaran strategis pada Misi 4 (M4), Tujuan 4 (T4). *“Memberikan pelayanan kepada publik yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan dengan sistem dan standar mutu yang tinggi”*.

1. Indikator sasaran strategis: Persentase program studi D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran program tersebut melalui:

- a) meningkatkan persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional (PIN); dan
- b) meningkatkan jumlah program studi yang difasilitasi akreditasi internasional.

2. Indikator sasaran strategis: Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB.

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran program tersebut melalui meningkatkan nilai rata sakip minimal BB.

3. Indikator sasaran strategis: Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93.

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran program tersebut melalui meningkatkan nilai Kinerja Anggaran minimal 93.

4. Indikator sasaran strategis: Predikat ZI-WBK/WBBM.

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran program tersebut melalui meningkatkan Predikat ZI menjadi WBK.

Arah kebijakan dan strategi dilaksanakan melalui program teknis dan kegiatan sesuai dengan target kinerja tahun 2020-2024.

Pada periode renstra 2020-2024, diperlukan strategi untuk melaksanakan arah kebijakan Polnep dengan mempertimbangkan pendekatan input, proses, output dan *outcomes*:

1. Memastikan pengembangan technical skills, soft skills, penanaman nilai budaya kerja, serta kemampuan berwirausaha pada kurikulum pendidikan, sehingga mendorong terwujudnya karakter lulusan yang siap kerja.
2. Pengayaan dan perluasan moda pembelajaran di program studi, melalui *experiential learning* di industri, magang di perusahaan/pemerintahan/lembaga internasional, masyarakat (membangun desa), kegiatan independen, atau aksi kemanusiaan, yang dapat diakui sebagai bagian dari Satuan Kredit Semester (SKS) program Pendidikan.



3. Meningkatkan fasilitas/dukungan baik kualitas dan kuantitas dalam pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa
4. Mendorong kinerja dosen untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan IDUKA baik nasional maupun internasional.
5. Melibatkan industri/masyarakat sebagai penopang dalam 'pentahelix' untuk mempercepat pembangunan pendidikan vokasi melalui penyusunan kurikulum, pembelajaran, asesmen kompetensi dan penyerapan lulusan serta kontribusi pendanaan.
6. Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan metode problem-based learning agar peserta didik dapat mengembangkan technical skills dan soft skills sesuai dengan standar IDUKA, dan standar internasional.
7. Meningkatkan peran dan fungsi struktur organ Polnep sesuai standar manajemen kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan peningkatan pelayanan Pendidikan
8. Mengikutsertakan mahasiswa yang memiliki talenta, minat dan bakat dalam kompetisi nasional dan internasional setelah melalui pembinaan kemahasiswaan.
9. Mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam etika pembelajaran dan pembinaan kegiatan kemahasiswaan
10. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan matriks pengembangan SDM baik melalui Pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
11. Memberikan kesempatan pengembangan diri sesuai dengan prioritas kepentingan organisasi
12. Mengalokasikan anggaran pada program prioritas perbaikan lingkungan akademik
13. Melaksanakan program pembinaan menuju kampus Badan Layanan Umum
14. Membentuk forum komunikasi dengan IDUKA beserta stakeholders lainnya
15. Menerapkan program studi Link and Match dengan industri

16. Meningkatkan peran dan fungsi satuan pengawas internal dan unit penjaminan mutu
17. Merintis unit publikasi, percetakan dan penerbitan
18. Menetapkan standar kompetensi pada setiap kurikulum program studi

Dengan melaksanakan strategi tersebut diharapkan mampu mencapai arah kebijakan melalui indikator-indikator kinerja kegiatan.

## B. KERANGKA REGULASI

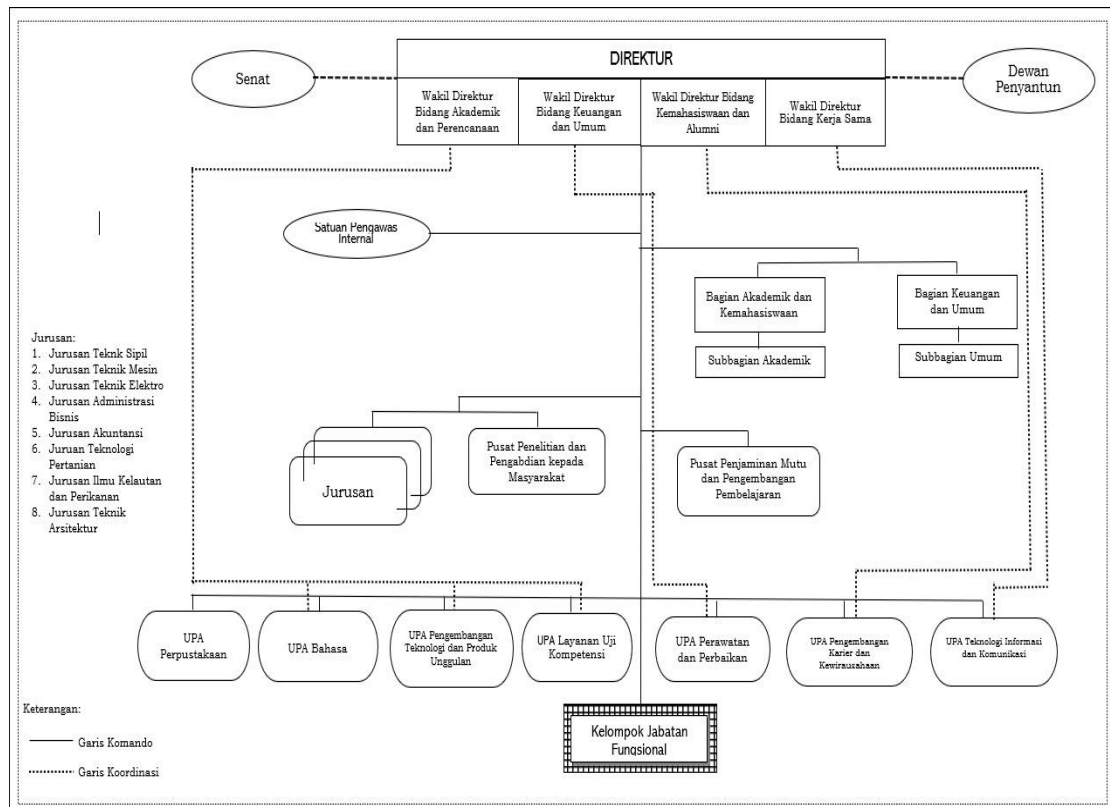
No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang besaran tarif UKT dan Iuran Pembangunan Institusi	Penetapan UKT dan IPI untuk Mahasiswa Baru tahun Akademik 2024/2025	2024
2	Kepmendikbud No. 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020	Definisi operasional dan parameter penghitungan capaian IKU Tahun 2020	2020
3	KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 / M / 2021	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2021
4	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Tentang Keputusan Menteri No. 210/M/2023	indikator kinerja utama yang pada pokoknya berisi tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	2023
5	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2023	Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Pontianak	2023
6	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2023	Penetapan Politeknik Negeri Pontianak Sebagai PK BLU	2023

Tabel 14. Kerangka Regulasi

## C. KERANGKA KELEMBAGAAN

### 1. Struktur Organisasi PTN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Negeri Pontianak, Struktur organisasi yang digunakan oleh Polnep saat ini tercantum pada gambar berikut:



Gambar 4. Struktur Organisasi Tata Kerja Politeknik Negeri Pontianak

### 2. Tugas dan Fungsi PTN

Politeknik Negeri Pontianak mempunyai Tugas menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan vokasi dalam sejumlah pengetahuan khusus, yaitu menyelenggarakan/ melaksanakan kegiatan:

1. Pendidikan, antara lain program pendidikan vokasi, membuat kalender akademik, kurikulum, tata cara penyelenggaraan perkuliahan, penilaian hasil belajar (bentuk, waktu, mekanisme, dan tata cara penilaian), administrasi akademik, bahasa pengantar, dan hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan;

2. Penelitian, antara lain program penelitian, keterlibatan dosen dan mahasiswa, publikasi hasil penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, hak kekayaan intelektual (HKI), dan hal lain yang berkaitan dengan penelitian;
3. Pengabdian kepada masyarakat, memuat antara lain tata cara penyelenggaraan, keterlibatan dosen dan mahasiswa, serta publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Pembinaan dan pengembangan sivitas akademika;
5. Etika akademik/kode etik, memuat etika akademik/kode etik yang berlaku di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak;
6. Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan memuat penjabaran tentang kebebasan akademik dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pemberian gelar dan penghargaan memuat tentang gelar akademik, profesi, atau vokasi, dan Pemberian penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang mempunyai prestasi sangat menonjol di bidang non-akademik;
8. Pelayanan administrasi tata kelola perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak.

Politeknik Negeri Pontianak sebagai Perguruan Tinggi Vokasional yang menyelenggarakan pendidikan tinggi mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 pasal 4 sebagai berikut:

1. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma; dan
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

Politeknik Negeri Pontianak (Polnep) dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi diharuskan sesuai dengan ketentuan Pasal 28

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang terdiri atas unsur:

1. Penyusun kebijakan;
2. Pelaksana akademik;
3. Pengawas dan penjaminan mutu;
4. Penunjang akademik atau sumber belajar; dan
5. Pelaksana administrasi atau tata usaha.

Politeknik Negeri Pontianak mempunyai Susunan Organisasi sesuai dengan tentang Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Pontianak dengan masing-masing memiliki tugas sebagai berikut yaitu:

1. Senat

Senat merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

2. Direktur

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan hubungan Sivitas Akademika dengan lingkungan.

3. Wakil Direktur;

Wakil Direktur terdiri dari atas 4 bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dengan tugas sebagai berikut:

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Perencanaan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta urusan perencanaan.
- b. Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang keuangan dan umum.
- c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

- d. Wakil Direktur Bidang Kerja Sama mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kerja sama, hubungan masyarakat, dan sistem informasi

4. Jurusan

Jurusan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung Program Studi.

Beberapa jurusan yang terdapat pada Politeknik Negeri Pontianak yaitu:

- a. Jurusan Teknik Sipil;
- b. Jurusan Teknik Mesin;
- c. Jurusan Teknik Elektro;
- d. Jurusan Administrasi Bisnis;
- e. Jurusan Akuntansi;
- f. Jurusan Teknologi Pertanian;
- g. Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan; dan
- h. Jurusan Teknik Arsitektur.

5. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni serta urusan perencanaan.

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas Subbagian akademik yang memiliki tugas untuk melakukan layanan administrasi dan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, registrasi Mahasiswa, dan statistik akademik serta pengelolaan data dan sarana akademik.

6. Bagian Keuangan dan Umum;

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, dan umum.

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas Sub Bagian Umum yang mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, keprotokolan, dan kerumahtangaan Polnep.

7. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

8. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran;

Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran.

9. Unit Pendukung Akademik meliputi:

1) Perpustakaan;

Unit Penunjang Akademik Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan.

2) Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan.

3) Bahasa;

Unit Penunjang Akademik Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan bahasa.

4) Perawatan dan Perbaikan;

Unit Penunjang Akademik Perawatan dan Perbaikan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan sarana penunjang akademik.

5) Pengembangan Teknologi dan Produk Unggulan;

Unit Penunjang Akademik Pengembangan Teknologi dan Produk Unggulan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi dan produksi produk unggulan.

6) Pengembangan Karier dan Kewirausahaan

Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karier dan Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan karier dan kewirausahaan Mahasiswa

7) Layanan Uji Kompetensi;

Unit Penunjang Akademik Layanan Uji Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan layanan uji kompetensi.

10. Satuan Pengawas Internal;

Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Direktur.

11. Dewan Penyantun

Dewan Penyantun merupakan organ yang menjalankan fungsi memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam statuta Polnep.

12. Kelompok Jabatan Fungsional

13. Unit Pendukung Lainnya.

3. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi memuat Rencana Kerja dan atau kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan target reformasi birokrasi kementerian, khususnya dalam rangka memperkuat 8 (delapan) area perubahan dan atau ZI/WBK dan WBBM pada masing-masing unit kerja. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah pimpinan dan jajarannya yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen



perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta penguatan kualitas pelayanan publik. Pada bulan Mei tahun 2019 Polnep telah melaksanakan pembimbingan pembangunan zona integritas oleh Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti. Pembangunan zona integritas dimaksud untuk memenuhi Program Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud dengan indikator Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM dan Nilai PMPRB Kemendikbud.

#### 4. Pengelolaan SDM

Berdasarkan struktur organisasi yang dimiliki, Polnep memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Dosen Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), Tenaga Kependidikan terdiri administrasi, Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP); Teknisi PNS dan P3K.

##### a) Perencanaan Penerimaan Pegawai

Rencana penerimaan pegawai mengikuti usulan formasi dari unit terkait. Proyeksi formasi pegawai PNS yang dibutuhkan dalam pengelolaan tugas dan fungsi Polnep dengan mengikuti standar nasional pendidikan tinggi untuk memenuhi rasio maksimal dosen dan mahasiswa untuk rumpun rekayasa dan pertanian adalah 1:15 dan rumpun sosial ekonomi adalah 1:30. Proyeksi formasi pegawai PNS yang dibutuhkan dalam pengelolaan tugas dan fungsi Polnep tercantum dalam tabel berikut:

No	Jenis Formasi Pegawai	Tahun Pelaksanaan (Status)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Dosen PNS	295	295	308	328	340
2	Dosen dengan Perjanjian Kerja	11	15	17	20	25
3	Jabatan Fungsional Tertentu	40	45	48	55	60
4	Teknisi	17	20	25	30	35
5	Administrasi	98	99	101	102	104

Tabel 15. Proyeksi Kebutuhan ASN sampai Tahun 2024

b) Pelaksanaan dan Pengawasan Kinerja Pegawai

Pelaksanaan kinerja pegawai dosen dan tenaga kependidikan menggunakan perangkat sasaran kinerja pegawai (SKP). SKP untuk tenaga kependidikan dilaporkan 6 bulan sekali. SKP untuk dosen dibuat diawal tahun sekaligus penilaian kinerja tahun sebelumnya. Selain itu, dosen harus membuat BKD dan LKD yang menjadi tanggungjawabnya sebagai dosen biasa ataupun dosen dengan tugas tambahan (DT).

c) Penghargaan dan Hukuman Pegawai

Penghargaan pegawai sebagai ASN diberikan melalui kenaikan pangkat dan golongan. Selain itu pemberian kenaikan gaji berkala setiap 2 tahun sekali merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam memberikan kesejahteraan bagi ASN yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau ditetapkan dengan Peraturan Direktur, selain penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi, diberikan juga hukuman atau sanksi kepada pegawai/ASN yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai, berupa peringatan tertulis hingga pemberhentian sebagai ASN, apalagi bagi ASN yang melakukan tindak korupsi/pidana berat (extra ordinary crime), akan langsung diberhentikan dengan tidak hormat setelah jatuhnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **A. TARGET KINERJA**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Politeknik Negeri Pontianak, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Politeknik Negeri Pontianak melakukan perubahan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada periode 2020, Politeknik Negeri Pontianak menggunakan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020. Pada periode 2021-2022, Politeknik Negeri Pontianak melakukan perubahan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021. Dan pada periode 2023-2024, Politeknik Negeri Pontianak menyesuaikan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Nomor 210/M/2023.

Berikut Indikator Kinerja Utama dan target Politeknik Negeri Pontianak pada periode 2020 sesuai Kepmendikbud Nomor 754/P/2020 sebagai berikut:

KODE	SASARAN KINERJA/ INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	BASELINE	TARGET 2020
<b>SK.1</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi</b>			
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	50	55
IKU 1.2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	%	10	10
<b>SK.2</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi</b>			
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by Subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	%	30	15
IKU 2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	%	30	30
IKU 2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	Hasil penelitian per jumlah dosen	0,1	0,1
<b>SK. 3</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran</b>			
SK 3.1	Persentase Program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	%	30	35

SK 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek ( <i>team-based project</i> ) sebagai bobot evaluasi	%	30	35
SK 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	%	0	2,5
<b>SK. 4</b>	<b>Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi</b>			
SK 4.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	BB
SK 4.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	93	93

Tabel 16. Indikator Kinerja Utama Polnep Periode 2020 berdasarkan  
Kepmendikbud No. 754/P/2020

Dengan Terbitnya Kepmendikbud Kepmendikbud Nomor 3/M/2021 sebagai pengganti Kepmendikbud nomor 754/P/2020 maka Politeknik Negeri Pontianak melakukan perubahan untuk menyesuaikan perubahan tersebut. Tujuan menyesuaikan tersebut adalah untuk :

1. **Penyempurnaan IKU:** Menyempurnakan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam peraturan sebelumnya dengan memberikan definisi yang lebih jelas dan rinci. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap indikator dapat diukur dan dievaluasi secara lebih akurat dan objektif.
2. **Penyesuaian dengan Kebutuhan Dunia Kerja:** Menyesuaikan IKU dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri. Ini termasuk menekankan pada kesiapan kerja lulusan, yang diukur melalui persentase lulusan yang bekerja, melanjutkan studi, atau berwirausaha.
3. **Meningkatkan Relevansi dan Kualitas Pendidikan:** Meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi dengan industri dan masyarakat. Ini bertujuan untuk

memastikan lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

4. **Akuntabilitas dan Transparansi:** Meningkatkan akuntabilitas PTN dengan menetapkan IKU yang jelas sehingga kinerja PTN dapat diukur dan dievaluasi secara lebih transparan dan objektif.
5. **Inovasi dan Kreativitas:** Mendorong inovasi dan kreativitas dalam pendidikan tinggi dengan memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan program-program inovatif yang dapat meningkatkan kualitas lulusan.

Dengan perubahan ini, Politeknik Negeri Pontianak diharapkan dapat mencapai target yang lebih relevan dengan kondisi dan tantangan terkini, serta menghasilkan lulusan yang siap menghadapi dinamika dunia kerja.

Perubahan Indikator Kinerja Utama dengan Kepmendikbud Nomor 3/M/2021 sebagai berikut:

KODE	SASARAN KINERJA/ INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	BASELINE	TARGET	
				2021	2022
SK.1	Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi				
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	56	56	58
IKU 1.2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	%	10	10	12
SK.2	Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi				

IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by Subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	%	15	15	17
IKU 2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	%	30	30	32
IKU 2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	Hasil penelitian per jumlah dosen	0,1	0,1	0,2
<b>SK. 3</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran</b>				
SK 3.1	Persentase Program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	%	35	35	37
SK 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek ( <i>team-based project</i> ) sebagai bobot evaluasi	%	30	35	37
SK 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	%	0	2,5	2,5
<b>SK. 4</b>	<b>Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi</b>				
SK 4.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	BB	BB
SK 4.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	95	94	95

Tabel 17. Perubahan Indikator Kinerja Utama Polnep Periode 2021-2022 berdasarkan Kepmendikbud No. 3/M/2021

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 Politeknik Negeri Pontianak melakukan adaptasi kebijakan pendidikan tinggi terhadap perubahan dan kebutuhan terbaru. Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 menunjukkan tambahan fokus pada riset dan teknologi, serta pengelolaan data yang lebih terintegrasi.

Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 juga menambahkan indikator kinerja baru dan memperjelas definisi serta kriteria indikator yang ada untuk memastikan evaluasi kinerja yang lebih akurat dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri. Dengan demikian, Politeknik Negeri Pontianak dan institusi pendidikan tinggi lainnya dapat lebih responsif dan adaptif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan lulusan yang dihasilkan.

Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 memperkenalkan beberapa perubahan penting, termasuk penambahan indikator baru terkait penilaian zona integritas dan perincian lebih spesifik pada beberapa indikator kinerja utama. Dengan perubahan Bnetuk Satker Politeknik menjadi PK BLU, maka terjadi revisi Target dari Satker biasa menjadi Target Liga Emas BLU, perubahan ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi, serta memastikan evaluasi kinerja yang lebih transparan dan objektif. Dengan penyesuaian ini, diharapkan Negeri Pontianak dapat lebih responsif terhadap perkembangan industri dan kebutuhan dunia kerja.

Perubahan yang di lakukan untuk menyesuaikan Indikator Kinerja Utama dengan peraturan tersebut sebagai berikut:

KODE	SASARAN KINERJA/ INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	BASELINE	TARGET	
				2023	2024
SK.1	Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi				
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%	70	80	82



IKU 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	%	30	30	35
<b>SK.2</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi</b>				
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%	30	30	35
IKU 2.2	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	%	40	40	45
IKU 2.3	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	Rasio	100	100	120
<b>SK. 3</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran</b>				
SK 3.1	Jumlah kerja sama per program D4/D3/D2	Rasio	100	100	110
SK 3.2	Persentase mata kuliah D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek ( <i>team-based project</i> ) sebagai bagian dari bobot evaluasi	%	25	50	50
SK 3.3	Persentase program studi D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	%	2,5	5	5
<b>SK. 4</b>	<b>Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi</b>				
SK 4.1	Predikat SAKIP	Predikat	BB	BB	A
SK 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	95	96	97

SK 4.3	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	Nilai	-	75	76
--------	---	-------	---	----	----

Tabel 18. Perubahan Indikator Kinerja Utama Polnep Periode 2023-2024 berdasarkan Kepmendikbudristek No. 210/M/2023

Berikut tabel sinkronisasi target program, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) sesuai Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023.

No	IKU	IKK	Kegiatan
<b>Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi</b>			
IKU1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	Persentase Lulusan yang berhasil mendapatkan pekerjaan	Penelusuran Alumni
		Persentase Lulusan yang melanjutkan studi	Workshop Pembekalan dan Pengembangan Karir Mahasiswa Tingkat Akhir
		Persentase Lulusan yang menjadi Wiraswasta	
IKU2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	Persentase mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS di Luar Kampus	Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Bernprestasi
		Persentase mahasiswa yang Meraih prestasi paling rendah Tingkat Nasional.	Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa
			Dukungan Operasional Kegiatan Lomba Mahasiswa
			Pemberian Bantuan Mahasiswa Mengikuti Lomba Tingkat Nasional

No	IKU	IKK	Kegiatan
<b>Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi</b>			
IKU3	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	Persentase Dosen berkegiatan Tridharma di kampus lain	Kerjasama Berbasis Pendidikan
		Persentase Dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri	
		Persentase Dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah Tingkat nasional	Honorarium Pelaksana Kegiatan Pembina UKM dan Pembimbing PKM yang lolos seleksi nasional
IKU4	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	Persentase Dosen tetap berkualifikasi akademik S3	Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan S3 untuk Dosen
		Persentase Dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja	Pemberian Bantuan Biaya Pelatihan Untuk Dosen
		Persentase Dosen tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri atau dunia kerja	Dukungan Operasional Uji Kompetensi (LSP)
			Kerja sama berbasis Pendidikan
IKU5	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat /industri/ pemerintah per jumlah dosen	Jumlah Publikasi hasil penelitian dan PKM yang mendapatkan rekognisi Internasional	Pelatihan penulisan Jurnal bagi Dosen Muda.
		Jumlah sitasi di jurnal Internasional	Sosialisasi Publikasi Jurnal Internasional
		Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan dari hasil penelitian	Sosialisasi pendaftaran HKI
		Jumlah paten yang dihilirkan ke industri/dipakai di Masyarakat	Penyediaan Dana Penelitian dan PKM yang bersumber dana internal ( PNBPN ) Polnep
		Jumlah keluaran penelitian dan PKM yang diterapkan oleh masyarakat	Pemberian bantuan Biaya
			Peningkatan kualitas dan kuantitas Jurnal Internal masing-masing jurusan di Polnep
			Pemberian bantuan Biaya Publikasi di Jurnal Nasional dan Internasional

No	IKU	IKK	Kegiatan
<b>Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran</b>			
IKU6	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	Jumlah Kerjasama yang dilakukan program studi dengan Dunia Industri/ Dunia Usaha/ PT QS Rank 100	Kerjasama Berbasis Pendidikan Operasional dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama dan Hubungan Internasional
IKU7	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) sebagai bobot evaluasi dan pembelajaran kelompok berbasis proyek sebagai bobot evaluasi	Worshop Penyusunan Proposal Program Kreativitas Mahasiswa Revisi Kurikulum program studi Kegiatan Uji Kompetensi Mahasiswa
IKU8	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	Jumlah Program Studi memiliki Akreditasi Internasional yang di akui Pemerintah Jumlah Program Studi yang memiliki Sertifikasi Internasional yang di akui Pemerintah	Dukungan Operasional Kegiatan Sosialisasi Akreditasi
<b>Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri</b>			
	Predikat SAKIP	Predikat SAKIP Satker minimal Predikat BB	Penyusunan Dokumen SAKIP
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Penyusunan Dokumen Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan
	Nilai evaluasi Zona Integritas	Ninail ZI WBK minimal 75	Penyusunan Dokumen Zona Integritas

Gambar 5. Tabel Sinkronisasi Target Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Sesuai Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023

## B. KERANGKA PENDANAAN

Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, disajikan pada tabel berikut:

NO.	SASARAN KINERJA	TAHUN			
		2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	42.526.107.000	34.721.308.000	43.763.478.000	49.445.376.000
2.	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	3.349.266.000	3.934.010.000	3.498.406.000	3.834.460.000
3.	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	4.279.707.000	4.308.422.000	1.084.190.000	2.620.469.000
4.	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	74.768.131.000	79.086.913.000	82.950.717.000	85.525.733.000

Tabel 19. Pagu Pendanaan Per Sasaran Kinerja Tahun 2020-2023

Berikut tabel realisasi anggaran dari tahun 2020-2023 dan proyeksi kebutuhan anggaran tahun 2024 berdasarkan sasaran kinerja Politeknik Negeri Pontianak sebagai berikut:

NO.	SASARAN KINERJA	TAHUN			
		2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	38.667.689.534	33.033.333.882	41.246.534.527	45.114.872.000
2.	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	3.064.559.438	3.575.197.164	3.273.460.024	3.475.429.896
3.	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	3.978.055.684	3.944.604.470	1.025.970.760	2.440.056.897
4.	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	69.666.976.697	75.526.496.173	78.870.926.653	81.828.815.199

Tabel 20. Realisasi Tahun 2020-2023

NO.	SASARAN KINERJA	PROYEKSI ANGGARAN TAHUN 2024
1.	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	31.675.012.000
2.	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	4.146.090.000
3.	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	564.448.000
4.	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	84.510.405.000

Tabel 21. Proyeksi Anggaran Tahun 2024

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. PEDOMAN PELAKSANAAN**

Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Pontianak tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen resmi yang memuat *road map* yang ingin dicapai Politeknik Negeri Pontianak selama lima tahun kedepan sampai dengan tahun 2024. Komitmen dari pimpinan dan segenap sivitas akademika Polnep adalah faktor kunci keberhasilan dalam melaksanakan program dan pencapaian target indikator kinerja Renstra yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dimonitoring dan dievaluasi serta diukur dengan akurat. Renstra ini juga merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pemanfaatan anggaran dalam peningkatan kualitas outcome dan output dan Renstra ini adalah dokumen perencanaan yang harus dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak.

Dengan telah disusunnya Renstra ini tidak berarti bahwa apa yang dicitakan dalam periode lima tahun mendatang sudah pasti dapat diwujudkan, tetapi Renstra ini hanya memuat hal-hal yang secara strategis ingin dicapai oleh Politeknik Negeri Pontianak dan bagaimana cara mencapainya. Untuk itu pimpinan Politeknik Negeri Pontianak harus mampu mengerahkan semua potensi yang dimilikinya untuk menjalankan Renstra ini, termasuk dalam hal penyediaan dana baik yang berasal dari pemerintah, dari masyarakat dan sumber-sumber lainnya.

Renstra Polnep tahun 2020-2024 ini disusun berdasarkan prediksi/asumsi kondisi lima tahun ke depan, jika terjadi perubahan lingkungan internal dan eksternal di luar prediksi, (adanya pandemik atau resesi) sehingga Renstra ini menghadapi kendala besar untuk diimplementasikan dan mencapai indikator target rencananya, maka dapat dilakukan perubahan Renstra atas inisiatif pimpinan Politeknik Negeri Pontianak menyesuaikan dengan kondisi pada saat tersebut. Perubahan arah kebijakan dan/atau target-target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat dilakukan hanya jika ada alasan-alasan kuat yang mendasarinya dan/atau tuntutan peraturan

perundangan yang berlaku serta mendapat persetujuan Senat Politeknik Negeri Pontianak.

## **B. KAIDAH PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Renstra (Rencana Strategis) merupakan suatu proses yang melibatkan beberapa kaidah atau prinsip penting agar dapat berjalan efektif dan berhasil mencapai tujuannya. Berikut adalah beberapa kaidah pelaksanaan Renstra yang umumnya diterapkan:

1. **Kepemimpinan yang Kuat:** Kepemimpinan yang komitmen dan memiliki visi yang jelas sangat penting untuk memastikan kesuksesan Renstra. Pimpinan harus mampu memobilisasi dan menginspirasi semua pihak terkait untuk bekerja menuju tujuan yang telah ditetapkan.
2. **Partisipasi dan Keterlibatan Stakeholder:** Melibatkan seluruh pihak terkait, baik dari internal (seperti staf, dosen, dan mahasiswa) maupun eksternal (misalnya pemerintah, industri, dan masyarakat) dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Renstra. Partisipasi ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan komitmen untuk mencapai tujuan bersama.
3. **Perencanaan yang Sistematis:** Renstra harus didasarkan pada analisis mendalam terhadap lingkungan internal dan eksternal, serta mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan (SWOT). Perencanaan harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur agar tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif.
4. **Pengukuran Kinerja dan Monitoring:** Implementasi Renstra memerlukan sistem pengukuran kinerja yang jelas dan monitoring yang teratur. Ini membantu untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi masalah atau hambatan yang mungkin muncul, dan memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat waktu.
5. **Fleksibilitas dan Adaptabilitas:** Meskipun Renstra telah direncanakan dengan matang, situasi yang berubah seperti perubahan kebijakan, perubahan ekonomi, atau faktor lainnya dapat mempengaruhi implementasinya. Oleh karena itu, fleksibilitas dan

kemampuan untuk menyesuaikan Renstra jika diperlukan adalah kunci keberhasilan.

6. **Komunikasi yang Efektif:** Komunikasi yang jelas dan terbuka antara semua pihak terkait sangat penting. Ini mencakup komunikasi tentang visi, tujuan, progres, dan perubahan yang terjadi dalam Renstra kepada seluruh stakeholder.
7. **Pemantapan dan Evaluasi:** Evaluasi berkala terhadap pencapaian target dan hasil yang diharapkan dalam Renstra sangat diperlukan. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan penyesuaian strategi jika diperlukan.
8. **Komitmen terhadap Akuntabilitas dan Transparansi:** Membangun budaya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap langkah pelaksanaan Renstra. Ini termasuk pengelolaan anggaran dengan transparan dan bertanggung jawab serta melaporkan pencapaian secara jelas kepada semua pihak terkait.

Dengan menerapkan kaidah-kaidah ini, pelaksanaan Renstra diharapkan dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga tujuan strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan sukses.



# **LAMPIRAN**

## 1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					Alokasi					Pelaksana/PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK. 1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi												
IKU 1.1	Presentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	55	56	57	58	60	41.152.635.000	31.042.713.000	40.691.766.000	45.997.551.000	30.151.430.000	Kepala Unit Kerja Sama dan Hubungan Internasional
IKU 1.2	Presentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang mengabdikan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	10	10	10	12	12	1.373.472.000	3.678.595.000	3.071.712.000	3.447.825.000	1.523.582.000	Ketua Jurusan
SK. 2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi												
IKU 2.1	Presentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil merail prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima).	%	15	15	15	17	17	73.800.000	72.200.000	76.800.000	76.800.000	81.800.000	Ketua Jurusan
IKU 2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia	%	30	30	32	32	35	214.240.000	874.010.000	509.078.000	673.772.000	586.590.000	Ketua Jurusan

	kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.												
IKU 2.3	Jumlah keluaran penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Hasil penelitian per jumlah dosen	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	3.061.226.000	2.987.800.000	2.912.528.000	3.083.888.000	3.477.700.000	Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
<b>SK.3</b>	<b>Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran</b>												
IKU 3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.		35	35	35	37	37	832.500.000	3.706.882.000	402.653.000	1.841.760.000	92.068.000	Kepala Unit Kerja Sama dan Hubungan Internasional
IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis projek ( <i>team-based project</i> ) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	35	35	35	37	37	3.007.749.000	485.920.000	391.676.000	778.709.000	465.584.000	Ketua Jurusan
IKU 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	439.458.000	115.620.000	289.861.000	-	6.796.000	Kepala Unit Penjamin Mutu
<b>SK.4</b>	<b>Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi</b>												
IKU 4.1	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB.	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	74.117.729.000	78.385.939.000	82.164.855.000	84.795.955.000	83.478.784.000	Pembantu Direktur I

IKU 4.2	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93.	Nilai	93	94	95	96	97	650.402.000	700.974.000	785.862.000	729.778.000	941.060.000	Pembantu Direktur II
---------	--	-------	----	----	----	----	----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

Tabel 22. Matriks Kinerja dan Pendanaan – Kepmendikbud No. 754/P/2020

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					Alokasi					Pelaksana/PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK 1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi												
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	55	56	57	58	60	41.152.635.000	31.042.713.000	40.691.766.000	45.997.551.000	30.151.430.000	Kepala Unit Kerja Sama dan Hubungan Internasional
IKU 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	%	10	10	10	12	12	1.373.472.000	3.678.595.000	3.071.712.000	3.447.825.000	1.523.582.000	Ketua Jurusan
SK 2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi												
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5	%	15	15	15	17	17	73.800.000	72.200.000	76.800.000	76.800.000	81.800.000	Ketua Jurusan

	(lima) tahun terakhir.												
IKU 2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	30	30	32	32	35	214.240.000	874.010.000	509.078.000	673.772.000	586.590.000	Ketua Jurusan
IKU 2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Hasil penelitian per jumlah dosen	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	3.061.226.000	2.987.800.000	2.912.528.000	3.083.888.000	3.477.700.000	Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
<b>SK 3</b>	<b>Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran</b>												
IKU 3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.		35	35	35	37	37	832.500.000	3.706.882.000	402.653.000	1.841.760.000	92.068.000	Kepala Unit Kerja Sama dan Hubungan Internasional
IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek ( <i>team-based project</i> ) sebagai	%	35	35	35	37	37	3.007.749.000	485.920.000	391.676.000	778.709.000	465.584.000	Ketua Jurusan

	sebagian bobot evaluasi.												
IKU 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	439.458.000	115.620.000	289.861.000	-	6.796.000	Kepala Unit Penjamin Mutu
<b>SK 4</b>	<b>Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi</b>												
IKU 4.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB.	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	74.117.729.000	78.385.939.000	82.164.855.000	84.795.955.000	83.478.784.000	Pembantu Direktur I
IKU 4.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93.	Nilai	93	94	95	96	97	650.402.000	700.974.000	785.862.000	729.778.000	941.060.000	Pembantu Direktur II

Tabel 23. Matriks Kinerja dan Pendanaan – Kepmendikbud No. 3/M/2021

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					Alokasi					Pelaksana/PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK 1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi												
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	55	56	57	80	80	41.152.635.000	31.042.713.000	40.691.766.000	45.997.551.000	30.151.430.000	Kepala Unit Penunjang Akademik (UPA) Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Ketua Jurusan
IKU 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi.	%	10	10	10	30	30	1.373.472.000	3.678.595.000	3.071.712.000	3.447.825.000	1.523.582.000	
SK 2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi												
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.	%	15	15	15	30	30	73.800.000	72.200.000	76.800.000	76.800.000	81.800.000	Ketua Jurusan
IKU 2.2	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	%	30	30	32	60	60	214.240.000	874.010.000	509.078.000	673.772.000	586.590.000	Ketua Jurusan
IKU 2.3	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.	Rasio	0,1	0,1	0,1	100	100	3.061.226.000	2.987.800.000	2.912.528.000	3.083.888.000	3.477.700.000	Ketua Jurusan
SK 3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran												
IKU 3.1	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	Rasio	35	35	35	100	100	832.500.000	3.706.882.000	402.653.000	1.841.760.000	92.068.000	Kepala Unit Kerja Sama Ketua Jurusan
IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.	%	35	35	35	50	50	3.007.749.000	485.920.000	391.676.000	778.709.000	465.584.000	

IKU 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.	%	2,5	2,5	2,5	5	5	439.458.000	115.620.000	289.861.000	-	6.796.000	Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
<b>SK 4</b>	<b>Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri</b>												
IKU 4.1	Predikat SAKIP.	Predikat	BB	BB	BB	BB	A	74.117.729.000	78.385.939.000	82.164.855.000	84.795.955.000	83.478.784.000	Wakil Direktur I
IKU 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L.	Nilai	93	94	95	95	95	650.402.000	700.974.000	785.862.000	729.778.000	941.060.000	Wakil Direktur II
IKU 4.3	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75.	Nilai	-	-	-	-	75	-	-	-	-	90.561.000	Wakil Direktur II

Tabel 24. Matriks Kinerja dan Pendanaan – Kepmendikbud No. 210/M/2023



## 2. KERANGKA REGULASI

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan teknologi tentang besaran tarif UKT dan Iuran Pembangunan Institusi	Penetapan UKT dan IPI untuk Mahasiswa Baru tahun Akademik 2024/2025	2024
2	Kepmendikbud No. 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020	Definisi operasional dan parameter penghitungan capaian IKU Tahun 2020	2020
3	KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 / M / 2021	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2021
4	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Tentang Keputusan Menteri No. 210/M/2023	indikator kinerja utama yang pada pokoknya berisi tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	2023
5	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2023	Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Pontianak	2023
6	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2023	Penetapan Politeknik Negeri Pontianak Sebagai PK BLU	2023

Tabel 25. Kerangka Regulasi

### 3. DEFINISI OPERASIONAL, METODE PERHITUNGAN, SUMBER DATA, DAN PIC/PENGAMPU MENGACU PADA KEPMENDIKBUDRISTEK 210/M/2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PIC
<b>Sasaran: Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi</b>				
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	<p>a. Kriteria pekerjaan: Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (<i>startup company</i>), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan lain-lain;</li> <li>2) organisasi nirlaba;</li> <li>3) institusi/organisasi multilateral;</li> <li>4) lembaga pemerintah; atau</li> <li>5) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)</li> </ol> <p>b. Kriteria kelanjutan studi: Melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/D4 terapan, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam rentang waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.</p> <p>c. Kriteria Kewiraswastaan: Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan, atau</li> <li>2) Pekerja lepas (<i>freelancer</i>).</li> </ol> <p>Formula:  <math display="block">\frac{\sum_{i=1}^t n_i k_i}{t} \times 100</math> </p> <p>n = responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.  t = total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan)  k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat lulusan bekerja dan mendapatkan pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 (enam) bulan.</p>	Aplikasi Tracer Study Kemdikbud Vokasi	Kepala Unit Penunjang Akademik (UPA) Pengembangan Karir dan Kewirausahaan
IKU 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	<p>a. Kriteria kegiatan pembelajaran di luar program studi Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Magang atau praktik kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, atau perusahaan rintisan (<i>startup company</i>).</li> <li>2) Proyek di desa:</li> </ol>	PDDikti dan Simkatmawa	Ketua Jurusan

INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PIC
	<p>Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.</p> <p>3) Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil.</p> <p>4) Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pertukaran pelajar juga menghitung aktivitas mahasiswa yang dilakukan antarprogram studi pada perguruan tinggi yang sama dan mahasiswa <i>inbound</i> yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran mahasiswa.</p> <p>5) Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.</p> <p>6) Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.</p> <p>7) Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.</p> <p>8) Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, <i>peace corps</i>, dan seterusnya).</p> <p>9) Bela Negara: Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air (contoh: Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), komponen cadangan, dan seterusnya). Kegiatan diselenggarakan oleh:</p> <p>a) Perguruan tinggi bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/lembaga lain terkait; dan/atau</p> <p>b) Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/lembaga lain terkait.</p> <p>b. Kriteria prestasi</p> <p>Mahasiswa S1/ dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil</p> <p>1) Berprestasi dalam kompetensi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetensi:</p> <p>a) Tingkat internasional;</p> <p>b) Tingkat nasional; atau</p> <p>c) Tingkat provinsi.</p> <p>2) Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat.</p> <p>3) Mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional.</p>		

INDIKATOR KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PIC
		<p>Formula</p> <p>a. Perguruan Tinggi Negeri Akademik</p> $\left(\frac{\sum_1^n a_n k_n}{x} \times 50\right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30\right)$ <p>a = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal.</p> <p>b = jumlah mahasiswa <i>inbound</i> yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal.</p> <p>c = jumlah prestasi oleh mahasiswa.</p> <p>x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi.</p> <p>y = total jumlah mahasiswa aktif.</p> <p>k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi, dan peringkat kejuaraan, dan sebagainya).</p> <p>b. Perguruan Tinggi Negeri Vokasi</p> <p>1) Formula untuk Politeknik</p> $\left(\frac{\sum_1^n a_1 k_n}{x} \times 25\right) + \left(\frac{\sum_1^n a_2 k_n}{x} \times 25\right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30\right)$ <p>2) Formula untuk Akademi Komunitas</p> $\left(\frac{\sum_1^n a_3 k_n}{x} \times 50\right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30\right)$ <p>a<sub>1</sub> = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal.</p> <p>a<sub>2</sub> = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan magang wajib di luar program studi sesuai kriteria minimal.</p> <p>a<sub>3</sub> = jumlah mahasiswa D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal dan menjalankan kriteria magang wajib.</p> <p>b = jumlah mahasiswa <i>inbound</i> yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal.</p> <p>c = jumlah prestasi oleh mahasiswa.</p> <p>x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi.</p> <p>y = total jumlah mahasiswa aktif.</p> <p>k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi, dan peringkat kejuaraan, dan sebagainya).</p>		
<b>Sasaran: Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi</b>				
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa	<p>a. Syarat pelaporan ke pimpinan perguruan tinggi</p> <p>1) kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat ketua departemen atau dekan;</p> <p>2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi</p>	Sister dan PDDikti	Ketua Jurusan

INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PIC
berkegiatan di luar program studi	<p>tempat nya bekerja (<i>sabbatical leave</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>);</p> <p>3) kegiatan harus disertai kontrak, surat tugas, atau surat keputusan di antara dosen dan organisasi luar kampus; dan</p> <p>4) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja atau jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus.</p> <p>b. Kriteria kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain</p> <p>Dosen yang melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:</p> <p>1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan sebagainya.</p> <p>2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan sebagainya.</p> <p>3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan sebagainya.</p> <p>c. Kriteria bekerja sebagai praktisi</p> <p>Dosen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir melalui:</p> <p>1) Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu (<i>full time</i>), atau paruh waktu (<i>part time</i>) di:</p> <p>a) perusahaan multinasional;</p> <p>b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas;</p> <p>c) perusahaan teknologi global;</p> <p>d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi;</p> <p>e) organisasi nirlaba nasional dan internasional;</p> <p>f) institusi/organisasi multilateral;</p> <p>g) lembaga pemerintah; atau</p> <p>h) BUMN/BUMD.</p> <p>2) Menjadi wiraswasta pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) di:</p> <p>a) perusahaan multinasional;</p> <p>b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas;</p> <p>c) perusahaan teknologi global;</p> <p>d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; atau</p> <p>e) organisasi nirlaba nasional dan internasional;</p> <p>3) Khusus untuk dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat juga berkegiatan:</p> <p>a) berkreasi independen atau menampilkan karya;</p> <p>b) menjadi juri, kurator/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau</p> <p>c) menjadi pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) sanggar.</p> <p>d. Kriteria membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi</p> <p>Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir:</p> <p>1) Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi.</p> <p>2) Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi:</p> <p>a) tingkat internasional;</p>		

INDIKATOR KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PIC
		b) tingkat nasional; atau c) tingkat provinsi. 3) Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, industri dan masyarakat. 4) Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional. Formula: $\frac{\sum_1^i n_1 k_1}{t} \times 100$ n = jumlah dosen dengan (Nomor Induk Dosen Nasional) NIDN yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. t = jumlah dosen dengan NIDN k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi tempat pelaksanaan kegiatan tridharma, jenis kegiatan membimbing, tingkat prestasi mahasiswa dan sebagainya)		
IKU 2.2	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	a. Kriteria sertifikat kompetensi/profesi Dosen yang memiliki sertifikasi dari lembaga berikut: 1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif; 2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 3) Lembaga atau asosiasi atau sertifikasi internasional; 4) Perusahaan Fortune 500; atau 5) Dunia usaha dunia industri. b. Kriteria pengajar yang berasal dari kalangan praktisi Praktisi mengajar di kelas sesuai dengan ketentuan minimal waktu per semester yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Praktisi berpengalaman kerja penuh waktu: 1) Bekerja di: a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan ( <i>startup company</i> ) teknologi; e) organisasi nirlaba nasional dan internasional; f) institusi/organisasi multilateral; g) lembaga pemerintah; atau h) BUMN/BUMD. 2) Menjadi wiraswasta pendiri ( <i>founder</i> ) atau pasangan pendiri ( <i>co-founder</i> ) di: a. perusahaan multinasional; b. perusahaan swasta berskala kecil ke atas; c. perusahaan teknologi global; d. perusahaan rintisan ( <i>startup company</i> ) teknologi; atau e. organisasi nirlaba nasional dan internasional;	Sister dan PDDikti	Ketua Jurusan

INDIKATOR KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PIC
		<p>3) Menjadi pekerja lepas (<i>freelancer</i>).</p> <p>4) Khusus untuk praktisi mengajar di program studi seni budaya dan bidang industry kreatif dapat juga berpengalaman:</p> <p>a) berkreasi independen atau menampilkan karya;</p> <p>b) menjadi juri, kurator/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau</p> <p>c) menjadi pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) sanggar.</p> <p>Formula:</p> $\left(\frac{a}{x+y} \times 60\right) + \left(\frac{b}{x+y+z} \times 40\right)$ <p>a = jumlah dosen dengan NIDN atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi.</p> <p>b = jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.</p> <p>x = jumlah dosen dengan NIDN</p> <p>y = jumlah deosen dengan NIDK</p> <p>z = jumlah dosen dengan Nomor Urut Pendidik (NUP)</p>		
IKU 2.3	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/ Pemerintah per jumlah dosen	<p>a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas:</p> <p>1) artikel ilmiah, buku akademik, dan bab (<i>chapter</i>) dalam buku akademik;</p> <p>2) karya rujukan: buku saku (<i>handbook</i>), pedoman (<i>guidelines</i>), manual, buku teks (<i>textbook</i>), monograf, ensiklopedia, kamus;</p> <p>3) studi kasus; dan/atau</p> <p>4) laporan penelitian untuk mitra.</p> <p>b. Karya terapan, terdiri atas:</p> <p>1) produk fisik, digital, dan algoritma (termasuk pototipe); dan/atau</p> <p>2) pengembangan invensi dengan mitra.</p> <p>c. Karya seni, terdiri atas:</p> <p>1) visual, audio, audio-visual, pertunjukan (<i>performance</i>);</p> <p>2) desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya;</p> <p>3) karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik; dan/atau</p> <p>4) karya preservasi (contoh: modernisasi seni tari. daerah)</p> <p>Formula:</p> $\frac{\sum_1^i n_1 k_1}{t} \times 100$ <p>n = jumlah karya dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/industri/pemerintah.</p> <p>t = jumlah dosen dengan NIDN/NIDK.</p> <p>k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat/industri/pemerintah atas karya).</p>	Sister	Ketua Jurusan

INDIKATOR KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PIC
<b>Sasaran: Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran</b>				
IKU 3.1	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	<p>a. Kriteria kemitraan Perjanjian kerja sama berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil <i>(output)</i> pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran);</li> <li>2) menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis <i>project</i> (PBL);</li> <li>3) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh;</li> <li>4) menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan;</li> <li>5) mengisi kegiatan pembelajaral dengan dosen tamu praktisi;</li> <li>6) menyediakan pelatihan (<i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i>) bagi dosen maupun instruktur;</li> <li>7) menyediakan <i>resource sharing</i> sarana dan prasarana;</li> <li>8) menyelenggarakan <i>teaching factory</i> (TEFA) di kampus;</li> <li>9) menyelenggarakan program <i>double degree</i> atau <i>joint degree</i>; dan/atau</li> <li>10) melakukan kemitraan penelitian.</li> </ol> <p>b. Kriteria mitra:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) perusahaan multinasional;</li> <li>2) perusahaan nasional berstandar tinggi;</li> <li>3) perusahaan teknologi global;</li> <li>4) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi;</li> <li>5) organisasi nirlaba kelas dunia;</li> <li>6) institusi/organisasi multilateral;</li> <li>7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject);</li> <li>8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan (untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya);</li> <li>9) instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD;</li> <li>10) rumah sakit;</li> <li>11) UMKM;</li> <li>12) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau</li> <li>13) lembaga kebudayaan berskala nasional/ bereputasi.</li> </ol> <p>Formula:</p> $\frac{\sum_{i=1}^t n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah kerja sama pada program studi S I dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria.</p> <p>t = jumiah program studi S1 danD4/D3/D2/D1.</p> <p>k = konstalta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra).</p>	SIKERMA	Kepala Unit Kerja Sama
IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau	<p>a. Kriteria pekerjaan:</p> <p>Metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemecahan kasus (<i>case method</i>):</li> </ol>	PDDikti	Ketua Jurusan



INDIKATOR KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PIC
	pembelajaran kelompok berbasis project ( <i>team-based project</i> ) sebagai bagian dari bobot evaluasi	<p>a) mahasiswa berperan sebagai “protagonis” yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus;</p> <p>b) mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; atau</p> <p>c) kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.</p> <p>2) Pembelajaran kelompok berbasis <i>project (team-based project)</i>.</p> <p>a) kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan;</p> <p>b) kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi;</p> <p>c) setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif;</p> <p>d) dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dari mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi; atau</p> <p>e) kelompok diberikan project dari dunia usaha industri.</p> <p>b. Kriteria evaluasi 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (<i>case method</i>) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis <i>project (team-based project)</i>.</p> <p>Formula:  <math display="block">\frac{n}{t} \times 100</math>   n = jumlah mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team-based project</i> sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi.  t = total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan</p>		
IKU 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	<p>Kriteria akreditasi dan sertifikasi: Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</p> <p>Formula:  <math display="block">\frac{n}{t} \times 100</math>   n = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah  t = Jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah meluluskan minimal 1 (kali)</p>	PDDikti	Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran

INDIKATOR KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PIC																								
Sasaran: Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi																												
IKU 4.1	Predikat SAKIP	<p>Berdasarkan Perpres 29 tahun 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai BB adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP &gt; 70 – 80, dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel.</p> <p>Formula</p> <p>Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:</p> <table><tr><th>Nilai</th><th>Predikat</th><th>Interprestasi</th></tr><tr><td>&gt; 90 – 100</td><td>AA</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>&gt; 80 – 90</td><td>A</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>&gt; 70 – 80</td><td>BB</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>&gt; 60 – 70</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>&gt; 50 – 60</td><td>CC</td><td>Cukup (Memadai)</td></tr><tr><td>&gt; 30 – 50</td><td>C</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>0 – 30</td><td>D</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Nilai	Predikat	Interprestasi	> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan	> 80 – 90	A	Memuaskan	> 70 – 80	BB	Sangat Baik	> 60 – 70	B	Baik	> 50 – 60	CC	Cukup (Memadai)	> 30 – 50	C	Kurang	0 – 30	D	Sangat Kurang	Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbudristek	Wakil Direktur I
Nilai	Predikat	Interprestasi																										
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan																										
> 80 – 90	A	Memuaskan																										
> 70 – 80	BB	Sangat Baik																										
> 60 – 70	B	Baik																										
> 50 – 60	CC	Cukup (Memadai)																										
> 30 – 50	C	Kurang																										
0 – 30	D	Sangat Kurang																										
IKU 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	<p><b>Kinerja Anggaran</b> adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.</p> <p><b>Nilai kinerja anggaran</b> adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).</p> <p><b>IKPA</b> Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. <b>EKA</b> Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.</p> <p>Formula</p> <p>Untuk menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:</p> <p><math>NKA=60\% \times EKA + 40\% \times IKPA 100\%</math></p> <p>Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.</p> <p>Nilai IKPA diambil dari 13 indikator pada aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN)</p>	SIMPROKA, KPPN Pontianak, MOLK, OMSPAN, SMART DJA	Wakil Direktur II																								

INDIKATOR KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PIC																																						
IKU 4.3	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	<p><b>Zona Integritas (ZI)</b> adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan merujuk pada PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Persyaratan penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM sebagai berikut:</p> <table><tr><th>Syarat</th><th>Menuju WBK</th><th>Komponen Nilai</th></tr><tr><td>Nilai Total</td><td>75</td><td></td></tr><tr><td>Nilai Minimal Pengungkit</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>Bobot nilai minimal per area pengungkit</td><td>60%</td><td>Memenuhi ambang batas 6 area perubahan/pengungkit</td></tr><tr><td>Nilai Komponen Hasil “Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel” minimal</td><td>18,25</td><td></td></tr><tr><td>a. Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal</td><td>15,75 (survey 3,60)</td><td>Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal reponden 30</td></tr><tr><td>b. Nilai sub-komponen “Kinerja Lebih Baik” minimal</td><td>2,5</td><td></td></tr><tr><td>Nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal</td><td>14,00 (survey 3,20)</td><td>Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal reponden 30</td></tr></table> <p>Ambang batas 6 area perubahan/pengungkit</p> <table><tr><th>Penilaian</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>1. Manajemen Perubahan</td><td>8%</td></tr><tr><td>2. Penataan Tata Laksana</td><td>7%</td></tr><tr><td>3. Penataan Sistem Manajemen SDM</td><td>10%</td></tr><tr><td>4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja</td><td>10%</td></tr><tr><td>5. Penguatan Pengawasan</td><td>15%</td></tr><tr><td>6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10%</td></tr></table> <p>Formula: Target IKU= (60% × Komponen Pengungkit) + (40% × Komponen Hasil) Komponen Pengungkit terdiri atas Subkomponen Pemenuhan dan Subkomponen Reform Komponen Hasil terdiri atas: Komponen Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel (Survey Presepsi Anti Korupsi dan Kinerja Lebih Baik) + Komponen Pelayanan Prima.</p> <p>Satuan : Persen Tipe Perhitungan : Nonkumulatif</p>	Syarat	Menuju WBK	Komponen Nilai	Nilai Total	75		Nilai Minimal Pengungkit	40		Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	Memenuhi ambang batas 6 area perubahan/pengungkit	Nilai Komponen Hasil “Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel” minimal	18,25		a. Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal	15,75 (survey 3,60)	Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal reponden 30	b. Nilai sub-komponen “Kinerja Lebih Baik” minimal	2,5		Nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal	14,00 (survey 3,20)	Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal reponden 30	Penilaian	Bobot	1. Manajemen Perubahan	8%	2. Penataan Tata Laksana	7%	3. Penataan Sistem Manajemen SDM	10%	4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%	5. Penguatan Pengawasan	15%	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%	Aplikasi SiAzik	Wakil Direktur II
Syarat	Menuju WBK	Komponen Nilai																																								
Nilai Total	75																																									
Nilai Minimal Pengungkit	40																																									
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	Memenuhi ambang batas 6 area perubahan/pengungkit																																								
Nilai Komponen Hasil “Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel” minimal	18,25																																									
a. Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal	15,75 (survey 3,60)	Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal reponden 30																																								
b. Nilai sub-komponen “Kinerja Lebih Baik” minimal	2,5																																									
Nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal	14,00 (survey 3,20)	Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal reponden 30																																								
Penilaian	Bobot																																									
1. Manajemen Perubahan	8%																																									
2. Penataan Tata Laksana	7%																																									
3. Penataan Sistem Manajemen SDM	10%																																									
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%																																									
5. Penguatan Pengawasan	15%																																									
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%																																									

#### 4. ANALISIS SWOT EVALUASI FAKTOR INTERNAL (EFI)

Faktor-faktor Kunci		Bobot	Rating	Nilai
Kekuatan (Strength) -- Kelemahan (Weakness)				
Kekuatan (Strength)				
a. Perspektif Keuangan (Financial Perspective)				
•	Pertumbuhan Pendapatan (PNBP) Cukup Tinggi	0.022	4	0.086
•	Pertumbuhan Aset Fisik Cukup Tinggi	0.022	3	0.065
•	Temuan Audit Eksternal Tidak Signifikan/Material	0.007	2	0.014
b. Perspektif Pelanggan (Customer Perspective)				
•	Jumlah Mahasiswa Asing	0.007	3	0.022
•	Tersedianya Fasilitas Career Development Center (CDC)	0.014	4	0.057
•	Frekuensi Kegiatan Rekrutmen di Lingkungan Kampus Cukup Tinggi	0.022	2	0.043
•	Fasilitas Belajar Mengajar di Kelas/Teori Memadai	0.022	3	0.065
•	Jumlah Lulusan Direkrut Melalui CDC Polnep Cukup Tinggi / tanya mima data cdc	0.007	2	0.014
•	Tersedianya Fasilitas Beasiswa Pemerintah dan Swasta	0.022	3	0.065
•	Tersedianya Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Bagi Mahasiswa/Lulusan	0.026	4	0.103
•	Fasilitas Belajar Mengajar Laboratorium/Praktek Cukup Memadai	0.022	3	0.065
•	Tersedianya Fasilitas Tempat Uji Kompetensi (TUK)	0.029	3	0.086
c. Perspektif Proses Bisnis Internal/Internal Business Process Perspective				
•	Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui Implementasi SPMI	0.024	4	0.096
•	Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal melalui Akreditasi Program Studi oleh BAN-PT	0.024	4	0.096
•	Renstra sebagai Dasar Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	0.022	4	0.086
•	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai (LAKIP) Sarana Pengukuran Kinerja Tahunan	0.022	4	0.086
•	Rapat Kerja, Rapat Pimpinan, Dialog Dosen-Mahasiswa (DDM), dan Kotak Saran Dikembangkan sebagai Sarana Komunikasi bagi Pengembangan Polnep	0.017	3	0.052

•	Mekanisme Pengawasan dan Pertimbangan Aspek Akademik oleh Senat	0.014	3	0.043
•	Mengimplementasikan Karakteristik Pendidikan Politeknik	0.014	3	0.043
•	Evaluasi Kurikulum & Silabus untuk Meningkatkan Relevansinya terhadap Kebutuhan Dunia Usaha dan Industri	0.026	4	0.103
<b>d. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan/Learning and Growth Perspective</b>				
•	Peningkatan Kualifikasi Dosen menjadi S3 (tinggi)	0.022	2	0.043
•	Pengembangan Kompetensi Dosen dalam Bidang-bidang Bersertifikat Keahlian (tinggi)	0.024	4	0.096
•	Sebagian Besar Program Studi Terakreditasi Baik/Unggul	0.019	3	0.057
•	Persentase lulusan IPK > 3.0 - Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau berwirausaha.	0.019	3	0.057
•	Jumlah Publikasi Nasional dan Internasional	0.022	3	0.065
•	Persentase Lulusan yang Bekerja Sesuai dengan Bidanganya	0.022	3	0.065
•	Persentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi dan Profesi	0.019	3	0.057
•	Persentase Mahasiswa Bersertifikat TOEIC/TOEFL/Bahasa Inggris	0.019	3	0.057
	<b>Jumlah Kekuatan (Strength)</b>			<b>1.847</b>
<b>Kelemahan (Weakness)</b>				
<b>a. Perspektif Keuangan (Financial Perspective)</b>				
•	Efisiensi Penggunaan Dana	0.014	2	0.029
•	Dana Internal untuk Pembangunan Pendidikan Terbatas	0.022	3	0.065
•	Dana pengadaan fasilitas pendukung pembelajaran & perkantoran	0.014	2	0.029
<b>b. Perspektif Pelanggan (Customer Perspective)</b>				
•	Ketersediaan Bahan Ajar (Layanan Belajar Mengajar)	0.022	2	0.043
•	Ketersediaan Media Belajar Mengajar Berbasis Multimedia	0.014	2	0.029
•	Kualitas Layanan Administrasi	0.022	2	0.043
•	Fasilitas Belajar Mengajar Laboratorium/Praktek pada Beberapa Program Studi Kurang Memadai	0.022	2	0.043
•	Pengabdian Masyarakat Belum Memberikan Manfaat yang Signifikan pada Kesejahteraan Masyarakat	0.014	3	0.043
•	Kerjasama Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak untuk Magang Mahasiswa Kurang Optimal	0.022	3	0.065
•	Kerjasama Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak untuk Generasi Pendapatan Kurang Optimal	0.022	3	0.065
•	Fasilitas Pendukung seperti taman, ruang terbuka, parkir, UKM dll kurang memadai	0.022	3	0.065

•	Program-program peningkatan softskill kurang optimal	0.014	3	0.043
<b>c. Perspektif Proses Bisnis Internal/Internal Business Process Perspective</b>				
•	Dewan Pengawas Pengawas Belum Ada	0.014	1	0.014
•	Unit-unit usaha yang belum berjalan dengan optimal	0.022	1	0.022
•	SDM yang berkompetensi dibidang pengelolaan bisnis	0.022	1	0.022
•	Fasilitas pendukung dan sertifikasi bisnis	0.022	1	0.022
<b>d. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan/Learning and Growth Perspective</b>				
•	Peningkatan Kualifikasi Teknisi/Laboran	0.014	2	0.029
•	Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kependidikan	0.014	2	0.029
•	Peningkatan Kualifikasi Pustakawan	0.014	2	0.029
•	Hasil Penelitian Belum Termanfaatkan	0.014	2	0.029
•	Peningkatan Kompetensi Dosen dalam Bidang-bidang Bersertifikat	0.014	2	0.029
•	Database dan Sistem Informasi Institusi yang Terintegrasi Belum Dikembangkan	0.014	2	0.029
•	SOP Layanan-layanan Belum Terimplementasi dengan Baik	0.014	2	0.029
•	Pemanfaatan Fasilitas Perpustakaan Rendah	0.014	2	0.029
•	Kemampuan Mengimbangi Kecepatan Perkembangan Teknologi Rendah	0.014	2	0.029
•	Keterlibatan dosen tamu dari industri	0.022	2	0.043
	<b>Jumlah Bobot Absolut dan Relatif</b>	1.000		
	<b>Jumlah Kelemahan (Weakness)</b>			<b>0.905</b>
	<b>Selisih Kekuatan (Strength) - Kelemahan (Weakness)</b>			<b>0.942</b>

Gambar 6. Analisis SWOT Evaluasi Faktor Internal (EFI)

Keterangan:

1. Total skor Kekuatan (*Strength*) adalah 1,847
2. Total skor Kelemahan (*Weakness*) adalah 0,905



## 5. ANALISIS SWOT EVALUASI FAKTOR EXTERNAL (EFE)

Faktor-faktor Kunci		Bobot	Rating	Nilai
Peluang (Opportunity) – Ancaman (Threat)				
<b>Peluang (Opportunity)</b>				
<b>a. Politik</b>				
•	Perhatian yang Besar dari Pemerintah Pusat terhadap Pentingnya Peningkatan Kualitas Pendidikan secara Berkelanjutan	0.020	3	0.060
•	Komitmen Pemenuhan Pendanaan Pendidikan Minimal 20% dari APBN dan APBD sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (4)	0.026	3	0.079
•	Upaya Pemerintah untuk Meningkatkan APK di Setiap Jenjang Pendidikan	0.026	3	0.079
<b>b. Ekonomi</b>				
•	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Cukup Tinggi	0.02	2	0.040
•	Stabilitas Nilai Tukar Rupiah	0.02	2	0.040
•	Tingkat Inflasi Relatif Stabil	0.02	3	0.060
<b>c. Sosial</b>				
•	Indonesia akan mendapat anugerah bonus demografi dalam rentang waktu 2020-2035 menciptakan peluang bagi Polnep mempersiapkan SDM terlatih	0.026	3	0.079
•	Biaya Hidup di Kota Pontianak yang Relatif Murah	0.026	3	0.079
•	Kota Pontianak sebagai kota tujuan utama Pendidikan di Kalimantan Barat	0.026	3	0.079
•	Pencanangan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang akan berimplikasi pada Kebutuhan SDM Kelautan dan Perikanan	0.02	3	0.060
•	Kesempatan untuk mengisi keperluan SDM pada berbagai bidang pembangunan yang diterapkan di Provinsi Kalimantan Barat, sebagai implikasi berkembangnya pembangunan sektor pertambangan dan infrastruktur di Kalimantan Barat.	0.02	3	0.060
<b>d. Pendidikan</b>				
•	Politeknik Negeri Pontianak berada pada lingkungan pendidikan tinggi yang cukup dinamis di Kalimantan Barat	0.02	3	0.060
•	Politeknik Negeri Pontianak memiliki peran penting dalam bidang pendidikan baik regional maupun nasional	0.02	3	0.060
•	Politeknik Negeri Pontianak sebagai bagian dari Kemdikbud yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan yang tertuang didalam Renstra Kemdikbud Tahun 2020-2024	0.026	4	0.106
•	Kebijakan Kampus Merdeka diartikan sebagai bentuk pemberian kebebasan secara otonom dan merdeka dari birokrasi yang berbelit kepada Perguruan Tinggi salah satunya Polnep	0.02	3	0.060
•	Sebagai salah satu PT Vokasi, Polnep berhak melaksanakan Program <i>Link and Match</i> dengan DUDIKA	0.026	4	0.106
•	Meningkatnya Kecenderungan Masyarakat untuk Melanjutkan Pendidikan di Bidang Vokasi	0.026	3	0.079
•	Perluasan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	0.026	3	0.079
•	Keberhasilan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun	0.02	3	0.060
•	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Tinggi dari 25,26% pada Tahun 2015 Menjadi 30,85% pada	0.02	3	0.060

	Tahun 2020			
•	Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi Lebih Ditikberatkan pada Perluasan Kapasitas Program-program Politeknik	0.026	3	0.079
•	Kebutuhan dan Kepercayaan Dunia Usaha dan Indutri terhadap lulusan Politeknik	0.02	3	0.060
•	Terbukanya Peluang Pengembangan Program-program Studi Baru yang Dibutuhkan Dunia Usaha dan Industri	0.026	4	0.106
•	Kebutuhan Masyarakat terhadap Hasil-hasil Penelitian Teknologi Tepat Guna	0.026	4	0.106
•	Kebutuhan Dunia Usaha dan Industri terhadap Hasil-hasil Penelitian Bernilai Komersial	0.026	4	0.106
•	Sumber Dana Eksternal untuk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	0.02	2	0.040
•	Kebutuhan Masyarakat terhadap Pengembangan Kewirausahaan	0.02	2	0.040
<b>e. Teknologi</b>				
•	Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Variasi Bisnis dan Pemanfaatannya dalam Seluruh Aspek Kehidupan Menciptakan Kebutuhan akan Penguasaan dan Penerapannya untuk Menghadapi Tuntutan Global	0.026	3	0.079
•	Meningkatnya Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Bidang Pendidikan	0.026	3	0.079
	<b>Jumlah Peluang</b>			<b>2.079</b>
<b>Tantangan (Threat)</b>				
<b>a. Politik</b>				
•	Perkembangan Politik Praktis yang Mengganggu Pencapaian Target-target Pembangunan	0.020	2	0.040
<b>b. Ekonomi</b>				
•	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Belum Memberikan Dampak Besar terhadap Perkembangan Sektor Riil sehingga Menyebabkan Rendahnya Pertumbuhan Lapangan Kerja	0.020	2	0.040
•	Semakin Luasnya Lingkup Perdagangan Bebas, Berlakunya Perdagangan Bebas Regional (ASEAN-China), dan Munculnya Raksasa Ekonomi Global seperti Cina dan India yang Semakin Mengancam Daya Saing Perekonomian Nasional;	0.020	2	0.040
•	Basis Kekuatan Ekonomi Indonesia yang Masih Mengandalkan Upah Tenaga Kerja yang Murah dan Ekspor Bahan Mentah dari Eksploitasi Sumber Daya Alam Tak Terbarukan;	0.020	2	0.040
•	Ancaman Masuknya Tenaga Trampil Menengah dan Tenaga Ahli dari Negara- negara Lain	0.020	2	0.040
•	Semakin Ketatnya ( <i>rigid</i> ) Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan	0.013	2	0.026



	Penggunaan Dana Pemerintah dalam Rangka Terwujudnya Peningkatan Kinerja, Keterbukaan/Transparansi, dan Akuntabilitas Satuan Kerja.			
<b>c. Sosial</b>				
•	Jumlah Penduduk yang Makin Tinggi	0.020	2	0.040
•	Dampak Negatif Globalisasi terhadap Nilai-nilai Sosial dan Budaya Asli Bangsa Indonesia	0.020	2	0.040
•	Besarnya Tuntutan terhadap Peningkatan Kualitas Hasil, Akuntabilitas, Transparansi, Efisiensi, dan Efektifitas Penyelenggaraan Pendidikan	0.013	2	0.026
•	Kebanggaan Masyarakat untuk Menyandang Gelar Sarjana	0.013	2	0.026
<b>d. Pendidikan</b>				
•	Pengembangan Pendidikan Vokasi oleh Perguruan Tinggi Pesaing	0.020	2	0.040
•	Tuntutan era revolusi industri 4.0, lulusan tidak cukup menguasai literasi lama tetapi harus mulai menguasai literasi baru	0.013	2	0.026
•	Komitmen untuk menghasilkan Lulusan yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.	0.013	2	0.026
•	Program studi yang dibuka dalam Kebijakan Kampus Merdeka harus sesuai dengan tuntutan daerah, industri dan dunia kerja	0.013	2	0.026
•	DUDIKA harus benar-benar dihadirkan dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma di Polnep	0.013	2	0.026
•	Perubahan Status Satuan Kerja Pendidikan menjadi Pengelolaan Keuangan	0.020	2	0.040
	Badan Layanan Umum (PK-BLU) Telah Memicu Persaingan antar Perguruan Tinggi Menjadi Semakin Ketat	0.020	2	0.040
•	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perguruan Tinggi-perguruan tinggi Pesaing	0.020	2	0.040
<b>e. Teknologi</b>				
•	Kemajuan teknologi yang berlangsung cepat menuntut Polnep mengembangkan roadmap rencana strategis	0.013	2	0.026
	<b>Jumlah Bobot Absolut dan Relatif</b>	1		
	<b>Jumlah Tantangan (Threat)</b>			<b>0.649</b>
	<b>Selisih Peluang (Opportunity) - Tantangan (Threat)</b>			<b>1.430</b>

Gambar 7. Analisis Swot Evaluasi Faktor External (EFE)

Keterangan:

3. Total skor Kekuatan (*Strength*) adalah 2,079
4. Total skor Kelemahan (*Weakness*) adalah 0,649